



**PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR
SETELAH IBUNYA MENINGGAL DUNIA OLEH
PENGADILAN AGAMA BREBES**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat dalam Rangka Penyelesaian
Studi Strata 1 untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh

NPM. 5115500212

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2019**

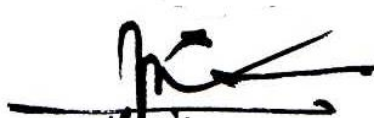
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR SETELAH IBUNYA MENINGGAL DUNIA OLEH PENGADILAN AGAMA BREBES

Ruth Yossi Natalia
NPM. 5115500212


Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I


Dr. H. Sanusi, S.H., M.H
NIDN 0609086202

Tegal, Oktober 2019

Pembimbing II


Dr. H. Nuridin, S.H., M.H
NIDN 0610116002

Mengetahui,

Dekan



Dr. Achmad Irwan Hamzani, SHI, M.Ag
NIDN 0615067604

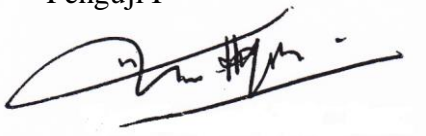
HALAMAN PENGESAHAN

PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR SETELAH IBUNYA MENINGGAL DUNIA OLEH PENGADILAN AGAMA BREBES

Ruth Yossi Natalia
NPM. 5115500212

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

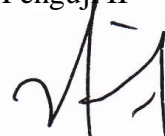
Penguji I



Toni Haryadi, S.H., M.H
NIDN 0020045801

Tegal, 10 Oktober 2019

Penguji II



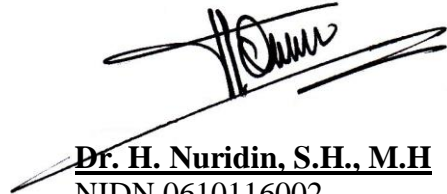
Kanti Rahayu, S.H., M.H
NIDN 0620108203

Pembimbing I



Dr. H. Sanusi, S.H., M.H
NIDN 0609086202

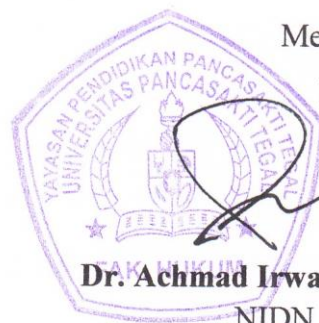
Pembimbing II



Dr. H. Nuridin, S.H., M.H
NIDN 0610116002

Mengetahui,

Dekan



Dr. Achmad Irwan Hamzani, SHI, M.Ag
NIDN 0615067604

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ruth Yossi Natallia**
NPM : 5115500212
Tempat/Tanggal Lahir : Purwokerto, 21 Desember 1977
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK DI
BAWAH UMUR SETELAH IBUNYA MENINGGAL
DUNIA OLEH PENGADILAN AGAMA BREBES**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat adengan sebenarnya.

Tegal, Oktober 2019

Yang membuat pernyataan,



Ruth Yossi Natallia

ABSTRAK

Ruth Yossi Natalia, *Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Setelah Ibunya Meninggal Dunia Oleh Pengadilan Agama Brebes*. Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2019.

Hak asuh anak yang belum *mumayyis* atau belum berumur 12 tahun apabila terjadi perceraian diserahkan kepada ibunya, namun ada kalanya sengketa pemeliharaan anak yang masih di bawah umur setelah ibunya meninggal dunia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum ada pasal yang menjelaskan tentang hak asuh anak setelah cerai atau ibunya meninggal dunia.

Tujuan dari penelitian ini untuk: 1) Mendeskripsikan ketentuan hak asuh anak di bawah umur setelah ibunya meninggal dunia dalam perspektif hukum Islam, 2) Mengetahui penyelesaian sengketa hak asuh anak di bawah umur setelah ibunya meninggal dunia di Pengadilan Agama Brebes pada perkara Nomor: 4836/Pdt.G/2018/PA.Bbs. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan dokumen. Analisis data penelitian menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian diperoleh suatu kesimpulan bahwa: 1) Ketentuan hak asuh anak di bawah umur setelah ibunya meninggal dunia dalam perspektif hukum Islam, menurut pendapat kebanyakan ulama terkait urutan pemegang hak asuh anak (*hadhanah*), yaitu: Ibu, ibunya ibu dan seterusnya ke atas, karena mereka menduduki kedudukan ibu, kemudian baru ayah dan seterusnya. Hal ini diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 KHI ayat (1). 2) Penyelesaian sengketa hak asuh anak di bawah umur setelah ibunya meninggal dunia di Pengadilan Agama Brebes pada perkara Nomor: 4836/Pdt.G/ 2018/PA.Bbs, majelis hakim sudah benar dalam mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan hasil perkawinan antara Penggugat dengan istri Penggugat (XXXX) yang bernama XXXX, lahir tanggal 17 Agustus 2009 di dalam pemeliharaan Penggugat. Oleh karena ibu-nya meninggal dunia, maka kedudukan urutan yang berhak mengasuh anak digantikan oleh wanita-wanita dalam lurus ke atas dari ibu, namun wanita-wanita dalam lurus ke atas dari ibu tidak ada, maka hak mengasuh anak otomatis digantikan oleh Penggugat sebagai ayah kandungnya. Keputusan tersebut sejalan dengan pendapat kebanyakan ulama terkait urutan pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) dan ketentuan Pasal 156 huruf (a).

Kata Kunci: Hak Asuh Anak, Anak Di Bawah Umur, dan Ibu Meninggal.

ABSTRACT

Ruth Yossi Natalia, *Settlement of Custody of Underage Children after Her Mother Died by the Brebes Religious Court*. Skripsi. Tegal: Legal Studies Program, Faculty of Law, Pancasakti Tegal University. 2019.

Custody of children who have not been mumayyis or are not yet 12 years old in the event of a divorce is handed over to their mother, but there are times when child care disputes are still underage after their mother dies. Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage, there is no article that explains about custody of children after divorce or the mother dies.

The purpose of this study is to: 1) Describe the provisions of custody of minors after their mothers die in the perspective of Islamic law, 2) Know the resolution of disputes for custody of minors after their mothers die in the Brebes Religious Court in Case No. 4836/Pdt.G/2018/PA.Bbs. This type of research is normative legal research. The source of this research data is secondary data, which includes: primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Methods of collecting data using library and document studies. Analysis of research data using qualitative descriptive analysis.

The results of the study obtained a conclusion that: 1) Provisions for custody of minors after their mothers die in the perspective of Islamic law, in the opinion of most related scholars the sequence of holders of child custody (hadhanah), namely: Mother, mother and so on to above, because they occupy the position of mother, then new father and so on. This is also regulated in the Compilation of Islamic Law Article 156 KHI paragraph (1). 2) Settlement of custody of minors after his mother dies in the Brebes Religious Court in case Number: 4836 / Pdt.G / 2018 / PA.Bbs, the panel of judges is correct in granting the Plaintiff's claim by establishing the marriage between the Plaintiff and his wife The Plaintiff (XXXX) named XXXX, was born on August 17, 2009 in the maintenance of the Plaintiff. Because his mother passed away, the position of the right to take care of the child was replaced by women in straight up from the mother, but women in straight up from the mother did not exist, then the right to take care of the child was automatically replaced by the Plaintiff as father his birth. This decision is in line with the opinion of most scholars related to the sequence of holders of child custody (hadhanah) and the provisions of Article 156 letter (a).

Keywords: Child Custody, Underage Children, and Mother Died.

PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa syukur, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

- Kedua orang tua tercinta, yang telah memberikan doa, semangat dalam penyusunan skripsi ini.
- Suamiku tercinta dan anak-anakku tersayang, yang memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Rekan-rekan yang mendukung dalam penyusunan skripsi hingga dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
- Almamater UPS Tegal.

MOTTO

- Anak-anak lebih membutuhkan contoh daripada kritik. (Josphe Joubert, *Pensées*)
- Mencintai anak tidaklah cukup, yang terpenting adalah anak-anak menyadari bahwa mereka dicintai orangtuanya. (St. John Bosco)
- Semakin kita melindungi anak setiap kali ia merasa kecewa, semakin dahsyat kekecewaan yang akan ia rasakan di masa yang akan datang. (Fred G. Gosman)
- Selalu kecup anak Anda setiap malam, meskipun ia telah terlelap. (H. Jackson)
- Tidak ada yang lebih indah ketika anak tertidur pulas kecuali sang ibu yang bahagia karena telah berhasil menidurkannya. (Ralph Waldo Emerson)
- Jangan mendidik anak untuk menjadi kaya, namun didiklah ia agar menjadi seseorang yang bahagia. Jadi, ketika anak tumbuh dewasa, ia akan menghargai nilai suatu benda ketimbang harganya. (Ruth Yossi Natalia)

KATA PENGANTAR

Syukur *alhamdulillah* penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi.

Selanjutnya ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Burhan Eko Purwanto, M. Hum, selaku Rektor UPS Tegal.
2. Bapak Dr. Achmad Irwan Hamzani, SHI, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Hukum IPS Tegal.
3. Bapak Dr. H. Sanusi, S.H., M.H, selaku Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan dengan sabar kepada penulis hingga terselesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Nuridin, S.H., M.H, selaku Pembimbing II yang telah sabar dan ikhlas membimbing dalam pembuatan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan yang berguna bagi masa depan penulis.
7. Segenap jajaran bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang turut memberikan banyak bantuan dan pengarahan kepada penulis selama perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
11. Semua pihak yang membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Tegal, Oktober 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan tentang Pemeliharaan Anak	13
1. Pengertian Pemeliharaan Anak (<i>Hadhanah</i>)	13
2. Dasar Hukum Pemeliharaan Anak (<i>Hadhanah</i>)	16
3. Syarat-Syarat Pemeliharaan Anak (<i>Hadhanah</i>)	23
B. Tinjauan tentang Anak Di Bawah Umur	24
1. Pengertian Anak Di Bawah Umur	24
2. Hak-Hak Anak	26
3. Kewajiban Anak	33
C. Tanggung Jawab Pemeliharaan/Hak Asuh Anak	35

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Ketentuan Hak Asuh Anak di Bawah Umur setelah Ibunya Meninggal Dunia dalam Perspektif Hukum Islam	40
B. Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak di Bawah Umur setelah Ibunya Meninggal di Pengadilan Agama Brebes pada perkara Nomor: 4836/Pdt.G/ 2018/PA.Bbs	50
BAB IV PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran-Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam menganjurkan kepada umatnya untuk menikah dengan berbagai alasan sebagai bentuk motivasi dalam kehidupan. Nikah termasuk sunah para nabi, petunjuk para Rasul, dimana mereka adalah teladan yang wajib diikuti petunjuknya.¹ Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.²

Salah satu tujuan pernikahan untuk penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi, menata keluarga sebagai subjek membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama serta bertujuan membentuk perjanjian yang suci antara seorang pria dengan seorang wanita. Sehingga keluarga yang kekal dan bahagia dapat terwujud sehingga dapat mengasuh anak-anaknya dengan baik.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 ayat (1) dan (2), kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban akan berdiri sendiri akan berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2), disebutkan bahwasanya

¹ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Syyaidd Sabiq*, Penerjemah Tirmidzi, dkk, AM Waskito, dkk., (ed.), Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013, hlm. 402.

² M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 6.

kekuasaan orang tua dapat dicabut, akan tetapi orang tua mempunyai kewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.³

Hak asuh anak itu sendiri merupakan bentuk *mashdar* atau mengasuh anak. Mengasuh dalam artian tersebut adalah menjaga anak yang belum mampu mengatur dan merawat diri sendiri serta belum mampu menjaga diri dari berbagai hal yang mungkin membahayakan dirinya. Hukum tersebut dilakukan ketika pasangan bercerai dan mempunyai anak yang masih belum cukup umur untuk berpisah dengan ibunya. Ini disebabkan karena anak masih memerlukan pengasuhan, penjagaan, perawatan, pendidikan, dan melakukan hal-hal demi kemaslahatannya. Itulah yang disebut dengan perwalian.⁴

Prosedur hak asuh anak menurut hukum perdata setelah bercerai, pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa salah satu dampak putusnya hubungan perkawinan adalah ayah atau ibu memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak. Bila terjadi perselisihan tentang penguasaan anak, pengadilan akan memberi keputusan kepada siapa hak pengasuhan anak tersebut akan diberikan. Pada poin kedua, ayah memiliki tanggung jawab atas seluruh biaya pendidikan dan pemeliharaan yang diperlukan anak tersebut. Jika dalam kenyataannya ayah tidak mampu memenuhi kewajibannya, pengadilan akan menentukan bahwa ibu ikut membantu memikul biaya itu. Pengadilan dapat mewajibkan pada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan atau menentukan kewajiban untuk bekas istri.

³ Abdul Manan M Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang peradilan Agama*, Jakarta: Raja Wali Press, 2000, hlm. 161.

⁴ Garda Law Office, *Hak Asuh Anak Menurut Hukum Perdata dan Prosedur yang Harus Dilewati*, Online: <https://www.advokatperceraian.com>. (16 Mei 2019).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum ada pasal yang menjelaskan tentang hak asuh anak setelah cerai jatuh pada ibu atau ayah. Tetapi terkait hal ini, pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dijelaskan secara lebih terperinci yakni:

1. Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibu.
2. Pemeliharaan anak yang sudah berusia di atas 12 tahun diserahkan kepada anak untuk menentukan di antara ibu atau ayahnya sebagai hak pemeliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan menjadi tanggungan ayah.

Sebagaimana tertuang dalam peraturan tersebut bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyis* atau belum berumur 12 tahun apabila terjadi perceraian diserahkan kepada ibunya, namun ada kalanya sengketa pemeliharaan anak yang masih di bawah umur setelah ibunya meninggal dunia. Seperti halnya pada kasus pemeliharaan anak atau hak asuh pada perkara Nomor: 4836/Pdt.G/2018/PA.Bbs.

Sejak istri Penggugat (XXXX Binti M Yusuf) meninggal dunia, anak Penggugat di asuh oleh orang tua angkatnya yang bernama M. XXXX, namun kemudian M. XXXX juga telah meninggal dunia pada tanggal 04 November 2018, sehingga anak penggugat sekarang dalam penguasaan Tergugat yang bernama selaku suami kedua M. XXXX. Gugatan hak asuh anak ini diajukan dikarenakan Penggugat ingin mendidik serta mengasuh seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan alm. XXXX Binti M Yusuf, karena bagaimanapun XXXX Bin Sultoni adalah anak kandung Penggugat sendiri dan Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi maupun pendidikan anak jika di asuh oleh Tergugat karena mengingat ibu dan nenek anak tersebut telah meninggal dunia dan masih memerlukan kasih sayang dan perhatian, oleh karenanya Penggugat selaku

ayah kandung merasa bertanggung jawab atas segala keperluan dan kebutuhan anak tersebut.

Pada Pasal 31 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa salah satu orangtua (ayah/ibu), saudara kandung, atau keluarga hingga derajat ketiga boleh mengajukan gugatan ke pengadilan agama mengenai pencabutan kuasa hak asuh anak bila ada alasan yang kuat terkait hal tersebut. Terkait gugatan hak asuh anak, bila dilihat dari segi kepentingan penggugat setidaknya ada dua kemungkinan bentuk tuntutan yaitu:

1. Pihak penggugat hanya berkepentingan untuk menetapkan menurut hukum bahwa hak pemeliharaan anak tersebut ada dalam penguasaannya. Padahal faktanya anak tersebut sudah berada dalam penguasaan dan pemeliharaannya. Hal ini dilakukan karena ada indikasi yang kuat bahwa pihak tergugat ingin merebut anak sementara tergugat tidak dapat memberikan jaminan untuk perkembangan terbaik bagi anak. Maksud hal ini adalah untuk menjaga supaya pihak tergugat tidak dapat mengambil anaknya begitu saja
2. Penggugat selain berkepentingan untuk menetapkan hak asuh anak secara hukum juga memiliki kepentingan untuk mendapatkan anaknya lagi ke dalam pemeliharaannya yang selama ini sudah dikuasai tergugat.⁵

Peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur hukum keluarga di Indonesia belum ada, akan tetapi secara substansial terjemakan dalam peraturan perundang-undangan yang memuat hukum Islam yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

⁵ Garda Law Office, *Hak Asuh Anak Menurut Hukum Perdata dan Prosedur yang Harus Dilewati*, Online: <https://www.advokatperceraian.com>. (16 Mei 2019).

tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Ketiga peraturan perundang-undangan tersebut merupakan sumber hukum materiil yang menjadi rujukan utama hukum keluarga di lingkungan Peradilan Agama sebagai pengadilan yang salah satu kewenangannya menangani masalah masalah hukum keluarga bagi orang yang beragama Islam.⁶

Ketentuan hukum hak asuh anak agar mendapatkan pembahasan yang lebih mendalam yakni: ketentuan hukum tentang sengketa hak asuh anak atau yang juga lazim disebut dengan hak *hadhanah* atau pemeliharaan anak yang terdapat dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Ketentuan hukum sengketa hak asuh anak dipilih untuk dikaji, agar mendapatkan pembahasan yang mendalam dikarenakan sengketa hak asuh anak merupakan ketentuan hukum yang perkaranya banyak terjadi di Pengadilan Agama dan umumnya selalu menjadi perhatian publik atau masyarakat luas. Di samping itu, ketentuan hukum hak asuh anak di bawah umur setelah ibunya meninggal dunia tersebut jarang dikaji secara mendalam.

Untuk memutuskan siapakah yang berhak mendapatkan kuasa asuh anak, masih belum ada aturan yang jelas. Bahkan hak asuh anak menurut hukum perdata juga belum jelas. Oleh sebab itu tidak heran jika banyak masalah dalam kasus perebutan hak asuh anak, sehingga penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan menetapkan judul “Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak di Bawah Umur setelah Ibunya Meninggal Dunia oleh Pengadilan Agama Brebes.”

⁶ Ahmad Zaenal Fanani, *Sengketa Hak Asuh Anak Dalam Hukum Keluarga Perspektif Keadilan Jender*, Jurnal Muslim Heritage, Vol. 2, No.1, Mei - Oktober 2017, hlm. 157.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan hak asuh anak di bawah umur setelah ibunya meninggal dunia dalam perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa hak asuh anak di bawah umur setelah ibunya meninggal dunia di Pengadilan Agama Brebes pada perkara Nomor: 4836/Pdt.G/2018/PA.Bbs?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan ketentuan hak asuh anak di bawah umur setelah ibunya meninggal dunia dalam perspektif hukum Islam.
2. Mengetahui penyelesaian sengketa hak asuh anak di bawah umur setelah ibunya meninggal dunia di Pengadilan Agama Brebes pada perkara Nomor: 4836/Pdt.G/2018/PA.Bbs.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari segi teoritis maupun dari segi praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis, dapat menjadi bahan kajian akademis dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya bagi pengembangan hukum terkait dengan hak asuh anak di bawah

umur dalam perspektif hukum Islam, serta dapat digunakan sebagai salah satu referensi atau bahan acuan untuk penelitian berikutnya.

2. Manfaat praktis, memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya umat Islam tentang pelaksanaan pengasuhan anak (*hadhanah*) setelah ibu meninggal dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pengasuhan anak (*hadhanah*) setelah ibunya meninggal dunia.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode pendekatan yang digunakan adalah *Case Approach* (pendekatan kasus) di mana metode ini dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penerapan hukum terkait dengan masalah penelitian.

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.⁷

Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap sistematik hukum, yaitu penelitian yang dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok atau dasar dalam hukum,

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2008, hlm. 52.

yakni masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum.⁸ Dalam hal ini yaitu terkait sengketa hak asuh anak di bawah umur setelah ibunya meninggal dunia oleh Pengadilan Agama Brebes pada Putusan Nomor 4836/Pdt.G/2018/PA.Bbs.

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan fenomena permasalahan hukum yang muncul di dalam masyarakat berkaitan dengan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum atau semua perbincangan mengenai makna hukum dalam hidup bermasyarakat. Penelitian deskriptif ini bertujuan menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang diteliti.

Data merupakan segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Sumber data penelitian menggunakan data sekunder, yaitu diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan, bersumber pada buku-buku literatur, dokumen, peraturan perundang-undangan dan arsip penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian.⁹ Sumber data penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor: 4836/Pdt.G/2018/PA.Bbs.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 15.

⁹ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007. hlm. 99.

Jenis data sekunder, terdiri dari atas dasar bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan non hukum. Maka sumber dan jenis bahan penelitian yang digunakan dalam bahan penelitian ini, meliputi:

- a. Bahan hukum primer yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yang berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.¹⁰
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
 - 2) Kompilasi Hukum Islam
 - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- b. Bahan hukum sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dengan kata lain dikumpulkan oleh pihak lain, berupa buku jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi, penelitian yang berwujud laporan dan buku-buku hukum,¹¹ seperti: dokumen Pengadilan Agama, buku tentang hukum dan jurnal penelitian hukum.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama acuan bidang hukum, seperti: kamus, literatur-literatur hasil penelitian, media massa, pendapat sarjana dan ahli hukum, surat kabar, website.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005, hlm. 142.

¹¹ *Ibid*, hlm. 36.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.¹² Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi pustaka dengan cara menelusuri perpustakaan, membaca, mengkaji dan mempelajari buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal penelitian, makalah, *searching* internet, dan pembelian buku referensi guna menunjang penelitian. Sedangkan studi dokumen dengan mencari data-data terkait dengan penelitian di lokasi penelitian berupa putusan Pengadilan.

4. Metode Analisis Data

Analisis data penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang bersifat deskriptif analitik yaitu berusaha menggambarkan dan menjelaskan terhadap sumber-sumber hukum yang dijadikan legitimasi terkait penyelesaian sengketa hak asuh anak di bawah umur setelah ibunya meninggal. Analisis deskriptif analitik ini dilakukan dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yaitu analisis interaktif. Dalam analisis ini, data yang diperoleh di lapangan disajikan dalam bentuk narasi.¹³

Proses analisis datanya menggunakan tiga proses yang saling berhubungan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

¹² Soerjono Soekanto. *Op Cit.* hlm. 21.

¹³ Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael, *Analisis data Kualitatif*, Alih Bahasa Tjeptjep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI Press, 1992, hlm. 16-19.

Reduksi data meliputi seleksi dan pemadatan data, catatan diringkas dan disederhanakan. Data tersebut ditampilkan dalam bentuk gabungan informasi, diringkas menggunakan teknik penalaran secara induktif dengan cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus kemudian ditarik kegeneralisasi yang bersifat umum. Langkah selanjutnya penarikan kesimpulan dan verifikasi data, mencakup proses pemaknaan dan penafsiran data terkumpul yang bertujuan untuk mendeskripsikan ketentuan hak asuh anak di bawah umur setelah ibunya meninggal dunia dalam perspektif hukum Islam dan penyelesaiannya di Pengadilan Agama Brebes pada perkara Nomor: 4836/Pdt.G/2018/PA.Bbs.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi memuat urutan penulisan penelitian dalam skripsi. Untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini dikemukakan tinjauan tentang pemeliharaan anak, meliputi: pengertian pemeliharaan anak, dasar hukum pemeliharaan anak, syarat-syarat pemeliharaan anak; tinjauan tentang anak di bawah umur, meliputi: pengertian anak di bawah umur, hak-hak anak, kewajiban anak); dan tanggung jawab pemeliharaan anak atau hak asuh anak.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam hal ini akan dijelaskan hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan ketentuan hak asuh anak di bawah umur setelah ibunya meninggal dunia dalam perspektif hukum Islam dan penyelesaian sengketa hak asuh anak di bawah umur setelah ibunya meninggal dunia di Pengadilan Agama Brebes pada perkara Nomor: 4836/Pdt.G/2018/PA.Bbs.

Bab IV Penutup, terdiri atas kesimpulan dan saran, dalam hal ini akan diuraikan jawaban penulis dari rumusan masalah penelitian dan memaparkan saran-saran dari penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Pemeliharaan Anak

1. Pengertian Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*)

Asuh ataupun pemeliharaan secara etimologi adalah “proses, cara, perbuatan memelihara, penjagaan, perawatan, pendidikan, penyelamatan, penjagaan harta kekayaan. Secara etimologis, *hadhanah* ini berarti di samping atau berada di bawah ketiak.¹⁴ Adapun secara terminologis adalah memelihara anak-anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan, atau menjaga kepentingannya karena belum dapat berdiri sendiri, serta melindungi diri dari segala yang membahayakan dirinya sesuai dengan kadar kemampuannya.¹⁵

Pemeliharaan anak dalam istilah fiqih digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu *kaffalah* atau *hadhanah*. Yang dimaksud dengan *kaffalah* atau *hadhanah* dalam arti sederhana ialah “pengasuhan” dan “pemeliharaan”. Dalam arti lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fikih karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah dan/atau ibunya.¹⁶

Secara syariat, mengasuh anak diartikan sebagai menjaga orang yang belum mampu mandiri mengurus urusannya sendiri, mendidik dan menjaganya

¹⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 293.

¹⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 224.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 327-328.

dari sesuatu yang merusak atau membahayakannya.¹⁷ Dalam istilah sehari-hari, kata *hadhanah* atau *al-hidhanah* lazim digunakan dengan maksud pengasuhan dan pekerjaan mengasuh anak. Adapun alasan mengapa *hadhanah* terkadang digunakan untuk pengertian *kafalah althifl* (tanggung jawab atau jaminan anak) dan *rawadhah al-athfal* (taman kanak-kanak). Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf g mengartikan *hadhanah* dengan pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan, mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa sehingga ia mampu berdiri sendiri atau mengurus urusannya sendiri. Termasuk dalam kewajiban untuk menyusui.

Hadhanah menurut istilah adalah pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir hingga berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh orang tua, kerabat atau ahli waris.¹⁸ *Hadhanah* berbeda dengan pendidikan (*tarbiyah*), dalam *hadhanah* mengandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani, di samping pemeliharaan jasmani dan rohani juga terkandung pula kewajiban mendidik anak.¹⁹ Pengertian *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh anak yang belum dapat mengurus diri mereka sendiri.²⁰

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pengasuhan terhadap anak-anak yang masih di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dilakukan oleh suatu lembaga yang dinamakan perwalian. Pada umumnya dalam setiap perwalian yang dikenal di dalam KUH

¹⁷ Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedi Tematis Ayat Al-Qur'an & Hadits Jilid 7*, Jakarta: Widya Cahaya, 2009, hlm. 188.

¹⁸ Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Pernada Media, 2004, hlm. 166.

¹⁹ Abd. Rahmad Ghazali, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 176.

²⁰ Abdul Haris Naim, *Fiqih Munakahat*, Kudus: Buku Daros, 2008, hlm.134.

Perdata hanya ada seorang wali saja, kecuali apabila seorang wali ibu kawin lagi, dalam hal mana suaminya menjadi wali. Jika salah satu dari orang tua tersebut meninggal, maka menurut KUH Perdata orang tua yang lainnya dengan sendirinya menjadi wali bagi anak-anaknya. Perwalian ini dinamakan perwalian menurut undang-undang.

Seorang anak yang lahir di luar perkawinan berada di bawah perwalian orang tua yang mengakuinya. Apabila seorang anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, ternyata tidak mempunyai wali, hakim akan mengangkat seorang wali atas permintaan salah satu pihak yang berkepentingan atau karena jabatannya. Tetapi ada juga kemungkinan seorang ayah atau ibu dalam surat wasiatnya mengangkat seorang wali bagi anaknya. Perwalian semacam ini disebut dengan perwalian menurut wasiat.

Seorang yang telah ditunjuk untuk menjadi wali harus menerima pengangkatan tersebut, kecuali jika ia mempunyai alasan-alasan tertentu menurut undang-undang dibenarkan untuk dibebaskan dari pengangkatan tersebut. Perwalian menurut KUH Perdata diatur dalam Pasal 330 ayat (3) yang berbunyi, “Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini”.

Dari pengertian-pengertian *hadhanah* tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa *hadhanah* itu mencakup aspek-aspek: pendidikan, tercukupnya kebutuhan, dan usia (*hadhanah* itu diberikan kepada anak sampai usia tertentu). Sehingga yang dimaksudkan dengan *hadhanah* adalah membekali anak secara material, spiritual, mental maupun fisik agar anak dapat berdiri sendiri dalam menghadapi

hidup masa kini dan kehidupan selanjutnya saat dewasa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menyebutkan pengertian pemeliharaan anak (*hadhanah*) secara definitif, melainkan hanya disebutkan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa *hadhanah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum *mumayiz*, tanpa perintah darinya, menyediakan sesuatu yang baik baginya, menjaga dari sesuatu yang menyakitinya dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar bisa berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.

2. Dasar Hukum Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*)

Dasar hukum *hadhanah* (pemeliharaan anak) dalam Al-qur'an adalah dalam firman Allah SWT Surat At-Tahrim ayat 6, yang artinya sebagai berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Dalam ayat tersebut orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah SWT. Dan anak merupakan bagian dari anggota keluarga. Dalam ayat tersebut juga dinyatakan bahwa orang tua khususnya bapak sebagai kepala keluarga yang berkewajiban menjaga keluarganya dari ancaman api neraka dengan cara memberikan pengajaran dan pendidikan yang optimal, serta mengarahkannya dari siksaan tersebut.

Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Secara khusus Al-qur'an menganjurkan kepada ibu bapak untuk mengasuh anak-anak mereka, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 233, yang artinya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa ayat Allah SWT menghendaki agar ibu-ibu menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh sebagai penyempurnaan terhadap susuannya. Kemudian Allah SWT berfirman dalam surat Ath-Thalaq ayat 6, yang artinya:

“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang istri yang sudah didceraikan tetapi dalam keadaan hamil, islam memerintahkan agar suami memberikan nafkah kepada istri. Jika istri tersebut menyusukan anak-anaknya, maka suami berkewajiban membayar upah susuan itu. Ayat di atas merupakan konsekwensi bahwa seorang ayah harus bertanggung jawab dalam hal memberikan terhadap istri yang hami dan melahirkan sekalipun istri telah ditalaq. Selanjutnya dalam firman Allah SWT surat At-Thaha ayat 132, yang artinya:

“Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki kepada mu, kamilah yang memberi rezki kepadamu dan akibat (yang baik) itu adala bagi orang yang bertaqwa.”

Kemudian perintah yang senada ditemui dalam surat Luqman ayat 17 yang artinya:

“Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhaap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.”

Dari dua surat di atas apat dipahami bahwa kewajiban orang tua adalah mendidik anak-anaknya dalam beribadah kepada Allah SWT, dengan memberikan pelajaran dan tauladan yang baik. Nasehat yang baik adalah merupakan bentuk dari *hadhanah* yang berguna mendidiknya, sehingga seorang anak memiliki kepribadian yang khas yaitu kepribadian Islam (*syakhsiyyah islamiyyah*).

Dari Abu Hurairah ra berkata, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda “setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, maka orang tuanya lah yang menjadikannya yahudi, nasrani atau majusi” (HR. Bukhari).²¹ Anak itu merupakan hak dari orang tua, dan yang harus diperhatikan bahwa apabila ia sudah bisa memilih antara ikut ayah atau ikut ibunya, maka pilihan diserahkan kepada anak.

Orang yang berhak dan berkewajiban melaksanakan *hadhanah* adalah orang tuanya, apabila orang tua si anak telah bercerai maka ibunyalah yang berhak memelihara anak tersebut. Sedangkan perbelanjaannya menjadi tanggung jawab dan kewajiban ayahnya, karena kewajiban nafkah kepada anak yang belum dewasa tidak hilang meskipun telah bercerai atau kekuasaannya dicabut. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Rasulullah, yang artinya:

Dari Abdullah bin Amr, bahwa seseorang perempuan bertanya: “Ya Rasulullah, sesungguhnya bagi anak laki-lakiku ini perutku yang menjadi bejananya, tetekku yang menjadi minumannya dan lambungku yang menjadi pelindungnya, dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikan aku, tiba-tiba ayahnya merasa berhak untuk mengambilnya dariku.” Maka sabdanya: “Engkau lebih berhak terhadapnya, selama engkau belum kawin dengan orang lain”.

Menurut hadits di atas, dapat dimengerti bahwa ibu dari anak adalah orang yang paling berhak melakukan *hadhanah* baik ia masih terikat dengan perkawinan atau ia dalam masa *iddah* talak *raj'i*, talak *ba'in*, atau telah habis masa *iddah*nya, tetapi ia belum kawin dengan laki-laki lain. Karena pada umumnya ibu lebih cenderung (kepada anak), lebih halus, lebih pemurah, lebih penyantun dan lebih penyayang. Akan tetapi apabila anak tersebut sudah pandai mengerti urusannya sendiri, maka menurut aturan syara' (hukum Islam), anak tersebut disuruh pilih mana yang lebih disukai antara ayah dan ibunya.

Namun apabila terjadi suatu hal, sehingga seorang ibu tidak mampu untuk melakukannya atau ia mendapat halangan untuk mengasuh anaknya, maka pengasuhan itu beralih kepada kerabatnya. Ulama madzhab berbeda pendapat mengenai urutan orang yang berhak mengasuh anak apabila seorang ibu tidak mampu mengasuh anaknya.

- 1) Hanafi: Hak itu secara berturut-turut dialihkan dari ibu kepada ibunya ibu, ibunya ayah, saudara-saudara perempuan kandung, saudara-saudara perempuan seibu, saudara-saudara perempuan seayah, anak perempuan dari saudara perempuan kandung, kemudian anak perempuan dari saudara seibu, dan demikian seterusnya hingga pada bibi dari pihak ibu dan ayah.

²¹ Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Beirut: Darul Fikri, tt, Jus 11, hlm. 118.

- 2) Maliki: Hak asuhan itu berturut-turut dialihkan dari ibu kandung kepada ibunya ibu dan seterusnya ke atas, saudara perempuan ibu kandung, saudara perempuan ibu seibu, saudara perempuan nenek dari pihak ibu, saudara perempuan kakek dari pihak ibu, saudara perempuan kakek dari pihak ayah, ibu ibunya ayah, ibu bapaknya ayah dan seterusnya.
- 3) Syafi'i: Hak atas asuhan, secara berturut-turut adalah ibu, ibunya ibu dan seterusnya hingga ke atas dengan syarat mereka itu adalah pewaris-pewaris si anak. Sesudah itu adalah ayah, ibunya ayah, ibu dari ibunya ayah, dan seterusnya hingga ke atas, dengan syarat mereka adalah pewaris-pewaris pula. Selanjutnya adalah kerabat-kerabat dari pihak ibu, dan disusul kerabat-kerabat dari ayah.
- 4) Hambali: Hak asuh itu berturut-turut berada pada ibu, ibunya ibu, ibu dari ibunya ibu, ayah, ibunya ayah, ibu dari ibunya ayah, kakek, ibu-ibu dari kakek, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, saudara perempuan ayah sekandung, seibu dan seterusnya.
- 5) Imamiyah: Ibu, ayah. Kalau ayah meninggal atau menjadi gila sesudah asuhan diserahkan kepadanya, sedangkan ibu masih hidup, maka asuhan diserahkan kembali kepadanya. Ibu adalah orang yang paling berhak mengasuh si anak dibanding dengan seluruh kerabat, termasuk kakek dari pihak ayah. Kalau kedua orang tua meninggal dunia, maka asuhan beralih ke tangan kakek dari pihak ayah. Kalau kakek dari pihak ayah ini meninggal tanpa menunjuk seorang penerima wasiat (yang ditunjuk untuk mengasuh), maka asuhan beralih pada kerabat-kerabat si anak berdasar urutan waris. Kerabat yang lebih dekat menjadi penghalang bagi kerabat yang lebih jauh. Bila anggota keluarga

yang berhak itu jumlah berbilang dan sejajar, semisal nenek dari pihak ayah dengan nenek dari pihak ibu, maka dilakukan undian manakala mereka berebut ingin mengasuh. Orang yang namanya keluar sebagai pemenang, dialah yang paling berhak mengasuh sampai orang ini meninggal atau menolak haknya.

Adapun alasan yang digunakan kenapa soal pemeliharaan anak diatur sedemikian rupa adalah bahwasanya semua anak siapapun yang lahir ke dunia, mau tidak mau harus dipelihara. Dan dalam hal ini yang paling patut memeliharanya ialah kerabatnya sendiri, dan kerabatnya itu pun yang satu lebih utama dari pada yang lain. Para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang berhak terhadap *hadhanah*, apakah yang berhak itu *hadhin* atau *mahdhun* (anak). Sebagian pengikut madzhab Hanafi, berpendapat bahwa *hadhanah* itu adalah hak anak, sedang menurut Syafi'i, Ahmad dan sebagian pengikut madzhab Maliki berpendapat bahwa *hadhin* yang berhak terhadap *hadhanah*. Jika diikuti pendapat pertama yang menyatakan bahwa *mahdhuun* yang berhak, berarti anak dapat menentukan pilihan apakah ia akan dididik dan dipelihara dengan baik atau tidak. Jika ia menginginkannya tentu hal itu baik baginya, sebaliknya jika ia tidak bersedia dididik dan dipelihara oleh *hadhin*, maka *hadhin* tidak dapat memaksanya, karena *hadhanah* itu hak anak. Hal ini akan berakibat anak tidak terdidik dan terpelihara. Sebaliknya jika diikuti pendapat kedua yang menyatakan bahwa *hadhanah* itu hak *hadhin*, maka hal ini berarti bahwa *hadhin* mempunyai hak pilih dalam melaksanakan haknya itu. Sebaliknya jika *hadhin* tidak bersedia melaksanakan *hadhanah* ia tidak dapat dipaksa melaksanakannya, karena *hadhanah* itu adalah haknya, ia boleh memilih untuk melaksanakan atau tidak

melakukannya. Seandainya terjadi hal yang demikian, maka dikhawatirkan bahwa anak terlunta-lunta pendidikan dan pemeliharaannya.

Kedua pendapat di atas mempunyai beberapa segi kelemahan. Kalau diikuti sepenuhnya pendapat pertama, akan terjadi pemaksaan untuk melaksanakan asuhan terhadap para pengasuh yang tidak mampu melaksanakan, seperti karena kemiskinan, kesibukan-kesibukan atau karena si pengasuh sakit dan sebagainya. Demikian pula bila diikuti pendapat kedua sepenuhnya, maka si anak asuh akan terlantar asuhannya, apabila si pengasuh tidak mau melaksanakan haknya, atau karena ada sesuatu keuntungan, maka para pengasuh ingin melaksanakan haknya.

Oleh sebab itu, sebaiknya kedua pendapat di atas dikumpulkan dengan arti bahwa pengasuhan itu di samping hak dari anak asuh juga merupakan hak dari si pengasuh. Anak asuh berhak mendapat pengasuhan dari pengasuhnya, karena ia memerlukan pemeliharaan, bimbingan, petunjuk, pelajaran dan sebagainya yang sangat diperlukannya untuk menghadapi kehidupan, terutama sebagai seorang muslim pada masa yang akan datang. Demikian pula halnya pengasuh, ia berhak atas pengasuhan anak asuhnya, karena ia termasuk orang yang menginginkan kebahagiaan dan kemaslahatan anaknya pada masa yang akan datang.

Selain dari sumber Al-qur'an dan sunnah, juga dapat diambil sumber lain, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku di Indonesia, mengenai kewajiban terhadap anak yang terdapat dalam Pasal 45 yaitu:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang disebutkan dalam pasal ini berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban yang mana berlaku meskipun perkawinan kedua orang tua putus.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum ada pasal yang menjelaskan tentang hak asuh anak setelah cerai jatuh pada ibu atau ayah. Tetapi terkait hal ini, pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dijelaskan secara lebih terperinci yakni:

1. Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibu.
2. Pemeliharaan anak yang sudah berusia di atas 12 tahun diserahkan kepada anak untuk menentukan di antara ibu atau ayahnya sebagai hak pemeliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan menjadi tanggungan ayah.

Berdasarkan ketentuan di atas, dari dalil Al-qur'an, Sunnah, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI dapat diketahui bahwa *hadhanah* (pemeliharaan anak) merupakan kewajiban, juga merupakan tuntutan secara sadar bagaimana pentingnya pengasuhan anak semenjak kecil. Bahkan *hadhanah* merupakan syari'at agama yang harus dipenuhi orang tua.

3. Syarat-Syarat Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*)

Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh yang disebut *hadin* dan anak yang diasuh disebut *mahdu'n*. Keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan itu. Dalam ikatan perkawinan ibu dan ayah secara bersama berkewajiban untuk memelihara anak hasil dari perkawinan itu. Setelah terjadinya perceraian dan keduanya harus berpisah, maka ibu dan atau ayah berkewajiban memelihara anaknya secara sendiri-sendiri.²²

²² Amir Syarifuddin, *Op Cit*, hlm. 328.

Agar pemeliharaan anak dapat berhasil dan berjalan dengan baik, diperluksn syarat-syarat bagi bapak asuh atau ibu asuh. Jika syarat *hadhanah* itu tidak terpenuhi, maka gugurlah hak *hadhanah*. Menurut Abd. Rahman Ghazaly dalam memberikan syarat-syarat *hadhanah*, sebagai berikut:

- a. Tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak melakukan *hadhanah* dengan baik.
- b. Hendaklah *hadhanah* seorang yang mukallaf, yaitu telah balig, berakal dan tidak terganggu ingatannya.
- c. Hendaklah mempunyai kemampuan melakukan *hadhanah*.
- d. Hendaklah dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, terutama yang berhubungan dengan budi pekerti.
- e. Hendaklah *hadinah* tidak bersuamikan laki-laki yang tidak ada hubungan mahram dengan si anak, maka *hadinah* itu berhak melaksanakan *hadinah*, seperti ia kawin dengan paman si anak dan sebagainya.
- f. *Hadhanah* hendaklah orang yang tidak membenci si anak. Jika *hadinah* orang yang membenci si anak dikhawatirkan anak berada dalam kesengsaraan.²³

B. Tinjauan tentang Anak Di Bawah Umur

1. Pengertian Anak Di Bawah Umur

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.²⁴ Ditinjau dari aspek

²³ Abdul Rahman Al-Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 182.

²⁴ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa, 2006, hlm. 36.

yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang dibawah umur atau keadaan di bawah umur atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali.²⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Sementara Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia

²⁵ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001, hlm. 5.

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Batas usia dewasa diatur dalam Pasal 98 ayat (1) Instruksi Presiden Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Kompilasi Hukum Islam juga membedakan anak yang belum dewasa, antara yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) dan yang telah *mumayyiz*.

Dengan demikian maka pengertian anak (*juvenile*) pada umumnya adalah seorang yang masih di bawah umur tertentu, yang belum dewasa dan belum pernah kawin. Pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai batasan umur berbeda-beda. Perbedaan tersebut bergantung dari sudut manakah pengertian anak dilihat dan ditafsirkan. Hal ini tentu ada pertimbangan aspek psikis yang menyangkut kematangan jiwa seseorang.²⁶ Di sisi lain, beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas, dirasa menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan.

2. Hak-Hak Anak

Anak sebagai golongan rentan memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya. Sebagaimana diketahui manusia adalah pendukung hak sejak lahir, dan

²⁶ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016, hlm. 42-43.

diantara hak tersebut terdapat hak yang bersifat mutlak sehingga perlu dilindungi oleh setiap orang. Hak yang demikian itu tidak terkecuali juga dimiliki oleh anak, namun anak memiliki hak-hak khusus yang ditimbulkan oleh kebutuhan-kebutuhan khusus akibat keterbatasan kemampuan sebagai anak. Keterbatasan itu yang kemudian menyadarkan dunia bahwa perlindungan terhadap hak anak mutlak diperlukan untuk menciptakan masa depan kemanusiaan yang lebih baik.²⁷

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini. Berkaitan dengan perlakuan terhadap anak tersebut, maka penting bagi kita mengetahui hak-hak anak dan kewajiban anak. Terlebih dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukan sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak.²⁸

Setiap orang mempunyai kepentingan sendiri yang berbeda antara manusia satu dengan yang lainnya dalam masyarakat. Untuk itu diperlukannya aturan hukum untuk menata kepentingan itu. Ketentuan hukum yang menyangkut kepentingan anak disebut hukum perlindungan anak. Hukum perlindungan anak adalah hukum yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban anak. Bismar

²⁷ Solehuddin, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang)*, Jurnal Universitas Brawijaya, Malang, 2013, hlm. 5.

²⁸ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 12.

Siregar mengatakan aspek perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur oleh hukum bukan kewajiban, mengingat secara hukum anak belum dibebani kewajiban.²⁹

Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur hak-hak anak sebagai berikut:

Pasal 2 Ayat 1

“Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.”

Pasal 2 Ayat 3

“Anak berhak atas perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.”

Pasal 2 Ayat 4

“Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar”

Pasal 3 Ayat 4

“Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan bantuan dan perlindungan.”

Pasal 4 Ayat 1

“Anak tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara, atau orang, atau badan.”

²⁹ Bismar Siregar, dkk, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta, Jakarta: Rajawali, 1998, hlm. 22.

Pasal 5 Ayat 1

“Anak tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar”

Pasal 6 Ayat 1

“Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.”

Pasal 8

“Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak:

Pasal 4

“Setiap anak berhak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pasal 5

“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.”

Pasal 6

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali.”

Pasal 7 ayat 1

“Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”

Pasal 8

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial.”

Pasal 9 Ayat 1

“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.”

Pasal 10

“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.”

Pasal 11

“Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”

Pasal 12

“Setiap anak berhak menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.”

Pasal 13

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya.”

Pasal 14

“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”

Pasal 15

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; e. pelibatan dalam peperangan.”

Pasal 16 Ayat 1

“Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.”

Pasal 16 Ayat 2

“Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.”

Pasal 17 Ayat 1

“Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan c) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.”

Pasal 18

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.”

Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun

1999 tentang Hak Asasi Manusia, perlindungan terhadap anak di atur dalam:

Pasal 52 Ayat 1

“Setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.”

Pasal 53 Ayat (1) dan Ayat 2

“(1) Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupan; (2) Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.”

Pasal 54

“Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.”

Pasal 55

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tuanya dan atau wali.”

Pasal 56 Ayat 1

“Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.”

Pasal 57 Ayat 1 dan Ayat 2

“(1) Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat dan dibimbing oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; (2) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal sebagai orang tua.”

Pasal 58 Ayat 1

“Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, pemberlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan.”

Pasal 59

“Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tua secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum

yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah kepentingan terbaik bagi anak.”

Pasal 60

“Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya.”

Pasal 61

“Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasan demi pengembangan dirinya.”

Pasal 62

“Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.”

Pasal 63

“Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan peristiwa lainnya yang mengandung unsur kekerasan.”

Pasal 64

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan, fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.”

Pasal 65

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.”

Pasal 66

“Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.”

Pasal 66 Ayat 5

“Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.”

Pasal 66 Ayat 6

“Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.”

Pasal 66 Ayat 7

“Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyktif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.”

Dari beberapa ketentuan perundang-undangan di atas, maka penulis mengkategorikan hak-hak anak, antara lain hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang; hak untuk mendapatkan identitas dan kewarganegaraan; hak untuk mengetahui orang tua, dibesarkan, dan diasuh orang tuanya; hak untuk memperoleh pendidikan yang sesuai; hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial; hak untuk mendapatkan kebebasan beribadah, berekspresi, dan berpikir; hak untuk memperoleh lingkungan terbaik; hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala hal yang dapat merugikan; hak untuk mendapatkan Air Susu Ibu (ASI). Penelitian ini difokuskan pada hak mendapatkan pengasuhan dari orang tuanya.

3. Kewajiban Anak

Selain berbicara mengenai hak-hak anak dirasa perlu juga untuk membahas kewajiban anak, karena antara hak dan kewajiban adalah suatu hal yang beriringan selalu. Kewajiban berarti sesuatu yang wajib diamalkan (dilakukan), keharusan, tugas yang harus dilakukan. Menurut Setya Wahyudi, anak melakukan kewajiban bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban menjadikan anak tersebut berpredikat “anak yang baik”. Anak yang baik tidak hanya meminta hak-hak saja, tetapi akan melakukan kewajiban-kewajibannya.³⁰

³⁰ M. Nasir Djamil, *Op Cit*, hlm. 21.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ada lima hal kewajiban anak di Indonesia yang mestinya dilakukan, antara lain:

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Anak wajib menghormati orang tua, karena ayah dan ibu lebih berhak dari segala manusia untuk dihormati dan ditaati. Bagi umat muslim, maka seorang anak diajarkan untuk berbakti, taat dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya.³¹ Kewajiban anak menghormati guru, karena guru telah mendidik, melatih otak, menunjukkan kepada kebaikan dan kebahagiaan. Maka patutlah pula bila anak wajib mencintai dan menghormatinya. Anak wajib mencintai keluarga, seperti saudara kandung, saudara ayah dan saudara ibu, karena mereka ikut menolong keperluan ayah dan ibu. Kewajiban mencintai masyarakat seperti tetangga, karena tetangga hidup bersama dengan keluarga (ayah-ibu). Di dalam memenuhi keperluan sehari-hari orang tua dan keperluan anak mesti membutuhkan bantuan tetangga. Demikian pula terhadap teman, anak harus menghormati, karena mereka merupakan sahabat yang tolong menolong. Oleh karena itu, anak berkewajiban pula untuk mencintai masyarakat/tetangga dan teman-temannya. Allah SWT berfirman dalam Alquran Surat An Nisa ayat 21, yang artinya:

³¹ *Ibid*, hlm. 21.

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.”

Anak wajib mencintai tanah air sebagai tempat dilahirkan, tempat tinggal dan hidup, juga segenap kerabat dan sahabat berada. Air yang kita minum, hasil bumi yang kita makan, dan udara yang kita hirup patutlah untuk mencintai serta membela kehormatan tanah air kita. Semua orang sebangsa dengan kita adalah warga masyarakat dengan bahasa persatuan yang sama, dan mereka tidak segan berkorban untuk kemuliaan tanah air, bangsa dan negara, anak wajib melakukan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dalam hal ini tidak terlepas dari tuntutan orang tua atau guru yang memberikan pengajaran agama. Anak wajib melaksanakan etika dan akhlak mulia sebagai wujud kesalihan sosial yang membuat hubungan antar anak dengan anak, antar anak dengan orang tua dapat teratur dan menunjukkan sikap yang beradab. Akhlak ialah instuisi yang berasal dari hati, tempat munculnya tindakan-tindakan sukarela, tindakan yang benar atau salah.

C. Tanggung Jawab Pemeliharaan/Hak Asuh Anak

Setiap keluarga mendambakan keluarga yang harmonis dan bahagia, namun dalam kenyataannya tidak selamanya dapat diwujudkan. Kehidupan berumah tangga antara suami istri sudah tentu mengharapkan agar perkawinan yang telah dibina dapat berjalan dengan langgeng dan menjadi suatu keluarga yang bahagia dan harmonis.

Keharmonisan keluarga mempunyai peranan yang cukup besar dalam perkembangan dan pertumbuhan jiwa anak kearah yang lebih baik, sebaiknya hubungan yang kurang harmonis akan menimbulkan perkembangan dan pertumbuhan anak yang tidak baik dan tidak terkendali. Anak kelak akan menjadi penerus keturunan yang mana anak mempunyai hak untuk dipelihara dan dididik dengan baik dan penuh kasih sayang oleh kedua orang tuanya. Kepribadian seorang anak akan tumbuh dengan baik apabila pendidikan yang diberikan kepada anak tersebut dibarengi dengan perhatian dan kasih sayang yang dicurahkan secara harmonis oleh kedua orang tuanya, sebaliknya apabila hubungan antara kedua orang tuanya tidak berjalan dengan harmonis maka perhatian dan kasih sayang terhadap anak akan menjadi berkurang bahkan tidak diperhatikan dan diperdulikan sama sekali. Sehingga dengan demikian hubungan antara anak dengan kedua orang tuanya tidak berjalan dengan baik.

Kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua tentu akan mengakibatkan dampak yang kurang baik, anak yang tidak mendapat perhatian akan mencoba mencari perhatian di luar. Anak menjadi tidak terurus dan dapat melakukan hal-hal apapun sesukanya tanpa adanya pengawasan orang tua sibuk mengurus perceraianya. Permasalahan mengenai anak pasca perceraian orangtuanya tidak akan terjadi sepanjang orangtuanya sama-sama mempunyai iktikad yang baik untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ibu memegang hak pemeliharaan anak-anak sedangkan ayah memberikan nafkah.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 30 menyebutkan bahwa “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.

Selanjutnya dalam Pasal 45 menegaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara keduanya putus.

Kewajiban mendidik dan memelihara anak-anak dilakukan oleh kedua orang tua terhadap anak-anaknya, sampai anak-anaknya menjadi dewasa dan mampu berdiri sendiri walaupun kedua orang tuanya telah bercerai. Selanjutnya dalam Pasal 47 dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Kekuasaan orang tua ini dapat saja dicabut akan tetapi orang tua tidak dibebaskan dari kewajiban memberi biaya nafkah anak hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 1 Tahun 74 tentang Perkawinan, sebagai berikut: “Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal: Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, dan berkelakuan sangat buruk.”

Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anaknya tersebut. Hal ini dilakukan agar kebutuhan anak-anak akan penghidupan dan perkembangannya tetap terjamin sampai anak-anak tumbuh menjadi dewasa. Untuk semakin

memperjelas tentang prinsip hukum yang mengatur tentang biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian, dalam hal ini perlu pula dikemukakan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 41 sebagai berikut:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan menentukan keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Kewajiban akan pemeliharaan hidup anak bukan hanya sekedar mencukupi kebutuhan sehari-harinya saja, akan tetapi juga yang paling penting dan terutama ialah bahwa ayah dan ibu tersebut mampu untuk mengurus dan membina kepribadian anaknya dengan benar dan baik sehingga anak tersebut nantinya akan menjadi manusia yang berguna bagi masa depannya sendiri, keluarganya, dan dalam kehidupan masyarakat.

Permasalahan mengenai pemeliharaan anak dan biaya nafkah, ayah dan ibu wajib melaksanakannya. Ibu berdasarkan hak pengasuhannya berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak di bawah umur sampai dewasa sedangkan ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah anak dalam hal untuk pendidikan, makanan, dan segala kebutuhan lain yang menunjang perkembangan anak-anaknya sampai anak-anak tersebut dewasa. Putusnya hubungan perkawinan karena perceraian akan menimbulkan akibat hukum yang harus diperhatikan oleh para pihak yang bercerai, karena dengan putusnya perkawinan maka bukan berarti juga akan memutus kewajiban para pihak sebagai ayah dan ibu dalam hal

pemeliharaan, pengasuhan dan pemberian nafkah anak-anaknya. Apalagi jika putusnya perkawinan karena meninggal dunia.

Tindakan orang tua yang mengabaikan pemeliharaan anak ini dapat terjadi karena orang tua tidak menyadari bahwa walaupun telah bercerai atau ibunya telah meninggal dunia, anak tetap mempunyai hak untuk mendapatkan perhatian, pemeliharaan dan perlindungan dari orang tuanya bukan nenek dan kerabatnya. Pertanggungjawaban mengenai pemeliharaan yaitu hak asuh anak dan nafkah merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak. Namun dalam kenyataannya ayah yang sudah diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya, dikemudian hari ayah tersebut sudah tidak peduli lagi akan kewajibannya. Ayah seringkali mengabaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Oleh karenanya hal ini menyebabkan anak-anak menjadi terlantar.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai hal-hal yang penulis kaji dalam penelitian sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu penyelesaian sengketa hak asuh anak di bawah umur setelah ibunya peninggal di Pengadilan Agama Brebes pada perkara Nomor: 4836/Pdt.G/2018/PA.Bbs. Sebelum membahas lebih lanjut tentang hasil penelitian terlebih dahulu penulis akan mendeskripsikan ketentuan hak asuh anak di bawah umur setelah ibunya meninggal dunia dalam perspektif hukum Islam.

A. Ketentuan Hak Asuh Anak di Bawah Umur setelah Ibunya Meninggal Dunia dalam Perspektif Hukum Islam

Di dalam tinjauan fikih, pemeliharaan anak disebut *hadhanah* yang artinya merawat dan mendidik anak yang belum *mumayiz*. Substansi dari merawat dan mendidik adalah karena yang bersangkutan tidak atau dapat memenuhi keperluan sendiri. Para ulama fikih menyatakan wajib hukumnya untuk merawat dan mendidik, namun berbeda pendapat di dalam persoalan hak. *Hadhanah* atau biasa dengan hak asuh anak merupakan suatu kewajiban orang tua, baik dalam masa perkawinan atau bahkan perkawinan itu telah putus karena perceraian.

Menurut Arif Gosita kepastian hukum diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan.³² Ketentuan hukum tentang hak asuh anak dalam hukum keluarga Islam di Indonesia bisa

³² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak; Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm. 33.

dilihat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa kedua orang tua sama-sama memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban kedua orangtua tersebut menurut ayat (2) berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.³³

Penegasan hak asuh anak bagi kedua orang tua pasca perceraian juga dicantumkan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan memberi keputusan. Akan tetapi, tanggung jawab atas biaya yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan tersebut, menurut huruf (b), menjadi tanggung jawab bapak, jika bapak tidak mampu memenuhi tanggung jawab tersebut maka ibu dapat dibebani tanggungjawab untuk memikul biaya tersebut.³⁴

Menurut Mukhtar Zamzami, ketentuan hak asuh anak dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut telah menggeser ketentuan yang sudah mapan sebelumnya yaitu hukum adat matrilineal, yang berhak dan mempunyai tanggungjawab terhadap pemeliharaan anak adalah ibunya.³⁵ Akan

³³ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Depag RI, 2001, hlm. 126.

³⁴ *Ibid*, hlm. 125.

³⁵ Mukhtar Zamzami, *Perempuan dan Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013, hlm. 186. Lihat pula Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 255.

tetapi Undang-Undang tersebut tidak memperjelas atau tidak mengatur dengan tegas tentang ketentuan hak asuh anak jika terjadi perceraian siapa antara bapak atau ibu yang diberi hak untuk mengasuh anak.

Ketentuan hukum yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbeda dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan di atas jika terjadi perceraian memberikan pengasuhan anak tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tua dan Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan uraian yang tegas jika terjadi perebutan hak asuh anak maka hak asuh anak diberikan kepada bapak atau Ibu. Adapun KHI memberikan uraian yang lebih detail tentang hal itu. Dalam KHI setidaknya ada dua pasal yang menentukan pengasuhan anak yaitu Pasal 105 dan 156. Sebagaimana terdapat pada Pasal 105 dan 156 KHI yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut:

Pasal 105

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Pasal 156

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - a) Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu;
 - b) Ayah;
 - c) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - e) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
 - f) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
2. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya;

3. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula;
4. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan Huruf (a), (b), (c), dan (d);
6. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.

Pasal 105 di atas menentukan tentang pengasuhan anak pada dua keadaan.

Pertama ketika anak masih dalam keadaan belum *mumayyiz* (kurang dari 12 tahun) pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya. Kedua ketika anak tersebut *mumayyiz* (usia 12 tahun ke atas) dapat diberikan hak kepada anak untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibunya. Adapun Pasal 156 mengatur tentang pengasuhan anak ketika ibu kandungnya meninggal dunia dengan memberikan urutan yang berhak mengasuh anak, yaitu wanita-wanita dalam garis lurus dari Ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu, dan wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Dasar yang dipakai dalam merumuskan Pasal 105 dan 156 KHI adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr berikut:

Seseorang perempuan berkata (kepada Rasulullah SAW): Wahai Rasulullah SAW anakku ini aku yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya, dan dibilikku tempat kumpulnya (bersamaku), ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dari aku', maka Rasulullah SAW bersabda: "Kamulah yang lebih berhak (memelihara)-nya, selama kamu tidak menikah." (Hadis Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Hakim mensahihkannya).

Hadis tersebut, menegaskan bahwa ibulah yang lebih berhak untuk memelihara anaknya, selama Ibunya itu tidak menikah dengan laki-laki lain. Apabila ibunya menikah, maka praktis hak asuh anak beralih kepada ayahnya. Alasan yang dapat dikemukakan adalah bahwa apabila ibu anak sudah menikah, maka besar kemungkinan perhatiannya akan beralih kepada suaminya yang baru, dan mengalahkan atau bahkan mengorbankan anak kandungnya sendiri.³⁶

Sependapat dengan itu, Abdurrahman ibnu Umar Ba'alawi menegaskan bahwa ibu yang sudah menikah tidak mempunyai hak asuh terhadap anaknya lagi, meskipun suaminya yang baru tersebut memiliki hubungan kerabat dengan anak tersebut.³⁷ Hadis lain yang juga dijadikan dasar dalam perumusan Pasal 105 dan 156 KHI tersebut adalah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah r.a. yang arti lengkapnya sebagai berikut:

Seorang perempuan berkata: Wahai Rasulullah SAW suamiku menghendaki pergi bersama anakku, sementara ia telah memberi manfaat kepadaku dan mengambil air minum untukku dari sumur Abi 'Inbah'. Maka datanglah suaminya, Rasulullah bersabda kepadanya: "Wahai anak kecil, ini ayahmu dan ini ibumu, peganglah tangan keduanya mana yang kamu kehendaki". Maka anak itu memegang tangan ibunya, lalu perempuan itu pergi bersama anaknya. (Hadis riwayat Ahmad dan Imam Empat).

Hadis di atas dijadikan dasar Pasal 105 ayat (2) dimana bagi anak yang sudah bisa memilih (*mumayyiz*) maka anak tersebut disuruh memilih. Namun pendapat Hanafiyyah, menegaskan Ibu tetap lebih berhak memeliharanya karena seorang perempuan lebih besar kasih sayangnya terhadap anak.³⁸ Ulama fikih

³⁶ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003, hlm. 251.

³⁷ Abdurrahman Ibn Umar Ba'alawi, *Bughyah al-Mustarsyidin*, Semarang: Usaha Keluarga, t.t., hlm. 245.

³⁸ Ahmad Rafiq, *Op Cit*, hlm. 252.

sepakat bahwa pada prinsipnya hukum hak asuh anak (*hadhanah*) adalah kewajiban bagi kedua orang tua (ayah dan ibu), tanpa membedakan jenis kelamin. Akan tetapi ulama fikih berbeda pendapat dalam menentukan siapa yang memiliki hak asuh anak pasca terjadi perceraian, apakah hak tersebut menjadi milik mutlak ibu atau yang mewakilinya atau merupakan hak anak yang diasuh.³⁹

Menurut Ibnu Rusyd hak asuh anak diatur tertibnya menurut konsep kedekatan dan kelembutan, bukan dasar kekuatan perwalian, seperti nikah, mawali, shalat jenazah dan warisan. Bisa saja orang yang tidak mewarisi tetapi berhak *hadhanah* seperti orang yang diberi wasiat, adik perempuan ayah, adik perempuan ibu, anak saudara laki-laki, dan anak saudara perempuan. Bisa saja orang mewarisi tetapi tidak berhak *hadhanah* seperti suami isteri orang yang diasuh, dan perwalian karena memerdekakan budak.⁴⁰

Adapun ulama Hanafiyah berpendapat bahwa mengasuh, merawat, dan mendidik anak merupakan hak pengasuh baik laki-laki maupun perempuan, akan tetapi lebih diutamakan kepada pihak perempuan, karena menurutnya pihak perempuan lebih bisa mencurahkan kelembutan dan kasih sayang serta membimbing anak, sedangkan laki-laki biasanya hanya punya kemampuan dan kewajiban menjaga, melindungi memberikan yang terbaik kepada anak secara fisik. Akan tetapi ulama Hanafiah mensyaratkan bahwa perempuan yang melakukan *hadhanah* adalah perempuan yang merupakan kerabat dari anak.⁴¹

³⁹ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Pena Media, 2008, hlm. 115.

⁴⁰ Ibnu Rusyd, *Muqaddimah Ibn Rusyd*, Juz II, Mesir: Dar al-Fikr, t.t., hlm. 258-259.

⁴¹ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Op Cit*, hlm. 116 -117.

Berbeda dengan Ibnu Rusyd dan Hanafiyyah, Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa hak *hadhanah* merupakan hak berserikat antara ibu, ayah, dan anak. Apabila terjadi pertentangan antara ketiga orang ini, maka yang diprioritaskan adalah hak anak yang diasuh.⁴² Mayoritas ulama fikih seperti mazhab Maliki, Hambali, Syafii dan Hanafi memberikan prioritas hak asuh anak kepada ibu daripada ayah. Argumen mereka adalah perempuan mempunyai naluri yang lebih sesuai untuk merawat dan mendidik anak, serta adanya kesabaran mereka dalam menghadapi permasalahan kehidupan anak-anak lebih tinggi dibanding kesabaran seorang laki-laki. Apabila anak tersebut sudah mencapai usia tertentu maka pihak laki-laki dapat dianggap lebih sesuai dan lebih mampu untuk merawat dan mendidik serta menghadapi berbagai persoalan anak tersebut sebagai pelindung. Atas dasar itu, dalam memberikan urutan hak asuh anak ulama fikih mendahulukan perempuan daripada laki-laki.⁴³

Wanita yang berhak mengasuh anak, menurut ulama fikih, adalah sebagai berikut:

1. Ibu lebih berhak mengasuh anak apabila bercerai dengan suaminya atau suaminya wafat, kecuali apabila ibu itu seorang pezina, pencuri, dan orang gila sehingga anak terancam tidak terawat dan sering ditinggal.
2. Menurut ulama madzhab Hanafi dan madzhab Syafii (baik dalam qaul qadim maupun dalam qaul jadid), setelah ibu maka yang berhak mengasuh adalah nenek (ibu dari ibu), kemudian ibu dari ayah dan seterusnya sampai ke atas.

⁴² Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid X, Beirut: Dar al-Fikr, 1997, hlm. 7297.

⁴³ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Op Cit*, hlm. 118.

Setelah itu hak pengasuhan pindah secara berturut-turut kepada saudara perempuan anak itu, saudara-saudara ibu yang wanita, anak-anak wanita saudara perempuan ibu, anak wanita dari saudara ibu yang laki-laki, lalu saudara wanita ayah, kemudian para ashabah sesuai dengan urutan hak warisnya.

3. Menurut Madzhab Maliki, setelah nenek (ibu dari ibu), yang berhak mengasuh anak secara berturut-turut adalah saudara perempuan ibunya, ibu dari ayah sampai keatas, saudara perempuan anak, saudara perempuan ayah, anak wanita saudara laki-laki anak itu, orang yang diberi wasiat oleh ayahdan/atau ibunya, kemudian para ashabah yang paling baik.
4. Menurut madzhab Hambali, hak pengasuhan anak setelah ibu berpindah secara berturut-turut kepada Ibu dari ibu, ibu dari ayah, nenek dari pihak ayah dan ibu sampai keatas, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu dengan ibu, saudara perempuan ayah dari ibu, anak wanita saudara laki-laki anak itu, anak wanita paman anak itu, kemudian berpindah kepada ashabah secara berurut yang dimulai dari ashabah yang terdekat.⁴⁴

Apabila para perempuan yang disebut di atas tidak ada atau meninggal dunia, maka hak pengasuhan baru pindah ke laki-laki. Hak pengasuhan bagi pria, menurut ulama madhab Hanafi, pendapat terkuat dalam madzhab Syafii dan Hambali, secara berurut bagi pria ashabah yang mendapat waris adalah ayah, ayah dari ibu dan ayah dari ayah sampai ke atas, kemudian saudara laki-laki, anak

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 119-120.

laki-laki dari saudara laki-laki sampai ke bawah, dan saudara laki-laki ayah. Apabila anak kecil itu tidak mempunyai ashabah, maka menurut madzhab Hanafi, hak pengasuhan anak berpindah kepada saudara laki-laki seibu dan anaknya, paman ibu dan anaknya, saudara laki-laki ibu sekandung dan anaknya.

Menurut madzhab Maliki, apabila kaum wanita yang tersebut di atas tidak ada maka hak pengasuhan anak berpindah kepada orang yang diberi wasiat oleh orang tuanya, kemudian saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seibu, saudara laki-laki seayah, kemudian kakek dari pihak ayah, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman dan anaknya, kemudian ashabah yang seketurunan.⁴⁵

Ulama fikih dalam kitab-kitab fikih klasik tentang siapa yang paling berhak mengasuh anak membagi menjadi dua priode, yaitu: periode anak sebelum *mumayyiz* dan periode anak sesudah *mumayyiz*.⁴⁶ Periode anak yang belum *mumayyiz* adalah dari waktu lahir sampai menjelang umur tujuh atau delapan tahun. Adapun menurut KHI, definisi *mumazziz* sebelum berumur 12 tahun. Pada periode ini, setelah memenuhi syarat-syarat pengasuhan anak kesimpulan para ulama menunjukkan bahwa ibu lebih berhak terhadap anak untuk diberi hak asuh anak. Adapun pada periode anak setelah *mumayyiz* yaitu dari umur tujuh tahun sampai anak menjelang baligh berakal. Pada masa ini anak dipandang secara sederhana telah mampu membedakan antara yang berbahaya dan yang bermanfaat bagi dirinya.⁴⁷

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 121.

⁴⁶ Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 170-171.

⁴⁷ *Ibid*.

Walaupun ulama fikih sepakat bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* jatuh pada ibunya, tapi ibu tersebut menurut para ulama fikih harus memenuhi beberapa syarat untuk mendapatkan hak asuh anak tersebut sebagai berikut: (1) Yang melakukan *hadhanah* harus sudah akil dan baligh (dewasa). (2) Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik anak. (3) Dapat dipercaya memegang amanah, dan berakhlak baik, sehingga lebih menjamin pemeliharaan anak. (4) Jika yang akan melakukan *hadhanah* adalah ibunya maka ibunya tersebut disyaratkan tidak kawin dengan laki-laki lain. (5) Beragama Islam.⁴⁸

Berdasarkan kajian tentang ketentuan hak asuh anak di bawah umur setelah ibunya meninggal dunia dalam perspektif hukum Islam, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan bahwa ketentuan hukum Islam tentang ketentuan hak asuh anak di bawah umur setelah ibunya meninggal dunia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 KHI ayat (1), yaitu anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan dengan memberikan urutan yang berhak mengasuh anak, yaitu wanita-wanita dalam garis lurus dari Ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu, dan wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Jika pemegang hak asuh anak tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak atau terjadi perselisihan, hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal

⁴⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op Cit*, hlm. 295.

156 KHI ayat (3) dan (5), yaitu apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula. Kemudian bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusan hak asuh anak kepada wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, dan saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.

B. Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak di Bawah Umur setelah Ibunya Meninggal di Pengadilan Agama Brebes pada perkara Nomor: 4836/Pdt.G/2018/PA.Bbs

Bila terjadi pemutusan perkawinan karena perceraian, baik ibu maupun ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan si anak.⁴⁹ Apabila perceraian terjadi antara suami istri yang telah berketurunan, yang berhak mengasuh anak pada dasarnya adalah istri, ibu anak-anak. Namun siapa yang berhak mengasuh anak jika putusnya perkawinan karena kematian istri atau ibu dari anak-anak. Serperti yang terjadi pada sengketa hak asuh anak di bawah umur setelah ibunya meninggal di Pengadilan Agama Brebes pada perkara Nomor: 4836/Pdt.G/ 2018/PA.Bbs.

Orang yang lebih berhak mengasuh anak saat tenggang waktu penentuan hak *hadhanah* adalah ibu dari si anak atau bila ibu tidak ada atau meninggal dunia,

⁴⁹ Satria Effendi M. Zein, *Ibid*, 172 -173. Lihat juga Andi Syamsu Alam dan M Fauzan, *Op Cit*, 121-122.

maka kerabat wanita dari garis keturunan ibu dapat menggantikannya. Namun apabila saat terjadi sengketa *hadhanah* anak, tidak dapat dilakukan serta-merata pengambilan anak secara paksa, oleh karenanya anak tidak mungkin dipaksakan karena akan sulit dilaksanakan dan menyangkut perasaan anak perlu diperhatikan. Hal ini dikhawatirkan dapat mengganggu psikologi si anak, sehingga diutamakan kepentingan anak (*for the best interest of (he child)*).

Penyelesaian sengketa hak asuh anak di bawah umur setelah ibunya meninggal di Pengadilan Agama Brebes pada perkara Nomor: 4836/Pdt.G/2018/PA.Bbs dalam perkara Pemeliharaan Anak antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Brebes, sebagai Penggugat;

Melawan:

TERGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Brebes, dalam hal ini memberi kuasa kepada WARJIYANTIE, SH, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln. Kancil No.4 Trayeman Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2018 sebagai Tergugat.⁵⁰

Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 November 2018 telah mengajukan gugatan Penguasaan Anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan Nomor 4836/Pdt.G/2018/PA.Bbs, tanggal 19 November 2018, yang pada intinya ingin mendidik serta mengasuh seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan alm. XXXX Binti M Yusuf, karena bagaimanapun XXXX Bin Sultoni adalah anak kandung Penggugat sendiri dan Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi maupun pendidikan

⁵⁰ Pengadilan Agama Brebes, Putusan Nomor: 4836/Pdt.G/ 2018/PA.Bbs., hlm. 1.

anak jika di asuh oleh Tergugat karena mengingat ibu dan nenek anak tersebut telah meninggal dunia dan masih memerlukan kasih sayang dan perhatian, oleh karenanya Penggugat selaku ayah kandung merasa bertanggung jawab atas segala keperluan dan kebutuhan anak tersebut.

Proses penyelesaian sengketa hak asuh anak di bawah umur setelah ibunya meninggal di Pengadilan Agama Brebes pada perkara Nomor: 4836/Pdt.G/2018/PA.Bbs dalam perkara Pemeliharaan Anak dalam persidangan sebagai berikut:

1. Tahap Pertama, Upaya Damai

Majelis Hakim berusaha menasehati para pihak untuk berdamai. Dalam hal ini Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap perkara perdata daripada putusan yang dipaksakan. Berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR maupun lewat proses mediasi, sesuai Ketentuan SEMA Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang perosedur mediasi.

Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. Wawan Nawawi, SH. yang ditetapkan oleh Majelis, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil (gagal). Oleh Karena Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

2. Tahap Kedua, Pembacaan Gugatan

Bila upaya damai tidak berhasil, Majelis Hakim akan memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan gugatan/permohonan

Penggugat/Pemohon. Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 November 2018 telah mengajukan gugatan Penguasaan Anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan Nomor 4836/Pdt.G/2018/PA.Bbs, tanggal 19 November 2018, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2009 telah terjadi pernikahan antara PENGGUGAT dengan XXXX Binti TERGUGAT , yang mana pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor urusan agama kecamatan Jatibarang, kabupaten Brebes, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 553/71/VII/2009, tertanggal 27 Juli 2009;
- b. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 Maret tahun 1984, XXXX (istri Penggugat) di angkat anak oleh XXXX yang telah menikah dengan M. XXXX, namun (M. XXXX) ayah angkat tersebut telah meninggal dunia dalam usia 60 tahun, kemudian XXXX menikah lagi dengan TERGUGAT;
- c. Bahwa selama dalam pernikahan antara PENGGUGAT dengan XXXX Binti M Yusuf berjalan harmonis layaknya Suami istri dan dalam keadaan Bada Ad-dhukhul serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama : XXXX Bin Sultoni, tempat tanggal lahir Brebes, 17 Agustus 2009, umur 9 (Sembilan) tahun, namun istri Penggugat (XXXX Binti M Yusuf) kemudian meninggal dunia hari Selasa, tanggal 15 Maret 2011, dengan surat Kematian Nomor: 145/71/XI/2018, tertanggal 16 November 2018;
- d. Bahwa sejak istri Penggugat (XXXX Binti M Yusuf) meninggal dunia, anak Penggugat di asuh oleh orang tua angkatnya yang bernama M. XXXX, namun kemudian M. XXXX juga telah meninggal dunia pada tanggal 04 November 2018, sehingga anak penggugat sekarang dalam penguasaan Tergugat yang bernama TERGUGAT selaku suami kedua M. XXXX;
- e. Bahwa gugatan hak asuh anak ini diajukan dikarenakan Penggugat ingin mendidik serta mengasuh seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan alm. XXXX Binti M Yusuf, karena bagaimanapun XXXX Bin Sultoni adalah anak kandung Penggugat sendiri dan Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi maupun pendidikan anak jika di asuh oleh Tergugat karena mengingat ibu dan nenek anak tersebut telah meninggal dunia dan masih memerlukan kasih sayang dan perhatian, oleh karenanya Penggugat selaku ayah kandung merasa bertanggung jawab atas segala keperluan dan kebutuhan anak tersebut;
- f. Bahwa penggugat tidak diperbolehkan Tergugat untuk sekedar mengajak main, membelikan makan atau mainan atau bepergian bersama hanya sekedar melepas kerinduan layaknya seorang ayah dengan anak yang telah berpisah kurang lebih 8 tahun, karena dahulu antara Penggugat dengan istri Penggugat terpisah jarak karena masing-masing orang tua tidak merestui perkawinan antara Penggugat dan alm. Istri Penggugat;

- g. Bahwa mengingat antara Penggugat dan anak Penggugat secara hukum lebih dekat dibandingkan dengan Tergugat, maka mohon agar majelis hakim yang memeriksa perkara a Quo mengabulkan gugatan penggugat dan menetapkan hak asuh anak XXXX Bin Sultoni berada dalam asuhan Penggugat selaku ayah kandung dari anak tersebut;
- h. Bahwa penguasaan Tergugat terhadap anak Penggugat XXXX Bin Sultoni tidak berdasar, karena Penggugatlah yang merupakan ayah kandung dari anak tersebut, sehingga Penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya, oleh karena itu Tergugat tidak berhak atas penguasaan terhadap anak tersebut;
- i. Bahwa dengan uraian diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak, dikarenakan Penggugat khawatir akan mempengaruhi tumbuh kembang anak apabila anak tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;⁵¹

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Brebes Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Menetapkan penguasaan anak Penggugat oleh Tergugat adalah tidak berdasar dan melawan hukum;
- c. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hakhadhonah/pengasuhan terhadap anak yang bernama: XXXX Bin Sultoni, umur 9 (Sembilan) tahun, lahir di Brebes, 17 Agustus 2009;
- d. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan kepada Penggugat seorang anak, yaitu XXXX Bin Sultoni, umur 9 (Sembilan) tahun, lahir di Brebes, 17 Agustus 2009);
- e. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau ada upaya hukum dari pihak lawan;
- f. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.⁵²

3. Tahap Ketiga, Jawaban Tergugat

Kesempatan Tergugat untuk menjawab gugatan Penggugat, baik secara lisan maupun tertulis. Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Juli 2009 telah terjadi pernikahan antara PENGGUGAT (Penggugat) dengan XXXX binti XXXX (bukan

⁵¹ *Ibid*, hlm. 1-3.

⁵² *Ibid*, hlm. 3.

binti M.YUSUF -Tergugat) dan pernikahan tersebut sah atau tidak dikarenakan:

- 1) XXXX binti XXXX pada saat itu dalam keadaan mengandung 8 bulan;
 - 2) Yang menjadi wali nikah adalah Lebe (Pamong Desa bernama SAKRIB Am) sementara Ayali kandung XXXX adalah XXXX;
 - 3) Perkawinan tersebut terpaksa dilaksanakan karena berawal dari pemerkosaan (mohon maaf) hingga XXXX hamil (mengandung);
- b. Bahwa benar pada sekitar tahtin 1984 XXXX diangkat anak oleh XXXX Dengan suaminya bernama XXXX; Dan setelah Ayah angkatnya-XXXX. meninggal dunia, kemudian XXXX menikah dengan XXXX (Tergugat).
- c. Bahwa tidak benar selama perkawinan antara Penggugat dengan XXXX MARDIANSIH binti XXXX Almh. Berjalan harmonis, namun yang terjadi adalah:
- 1) Setelah menikah XXXX tinggal bersama keluarganya yakni Tergugat sebagai ayah angkatnya dan XXXX sebagai ibu angkatnya, sementara Penggugat pergi entah kemana;
 - 2) Bahwa belum genap sebulan setelah pernikahan XXXX melahirkan seorang anak laki-laki tanpa diketahui dan ditunggu oleh Penggugat yang mengaku suaminya;
 - 3) Bahwa setelah bayi berumur 3 (tiga) bulan Penggugat menculik XXXX dan bayinya (diambil paksa pada malam hari secara diam-diam tanpa ijin Tergugat selaku orangtuanya);
 - 4) Bahwa kemudian Tergugat mencari dan mendatangi rumah nggugat ternyata benar XXXX dan bayinya diambil paksa, lalu XXXX minta pulang bersama bayinya;
 - 5) Bahwa berkisar 3 bulan kemudian Penggugat menculik (mengambil paksa) lagi XXXX dan bayinya ditengah malam buta tanpa sepengetahuannya dan seijin Tergugat sebagai orangtuanya, lalu Tergugat datang kerumah Penggugat menanyakan kepada XXXX mau ikut siapa dan XXXX memilih tinggal bersama Penggugat karena dibawah ancaman dan tekanan
 - 6) Bahwa beberapa bulan kemudian XXXX berhasil lolos dan keluar dari rumah Penggugat dengan sempoyongan dan muka lebam dan memar dan mengadu kepada Tergugat kalau Penggugat sering melakukan penganiayaan dan kekerasan tapi Tergugat tidak boleh melaporkan pada yang berwajib ataupun menceritakan pada orang lain. Akhirnya Tergugat hanya bisa menangis dan meratapi dalam hati melihat anak perempuannya diperlakukan kasar oleh Penggugat;
 - 7) Bahwa kemudian XXXX Tergugat antarkan lagi kerumah Penggugat karena bayinya masih tinggal di rumah Penggugat.
 - 8) Bahwa meskipun XXXX dan bayinya tinggal bersama Penggugat namun semua biaya hidup dan kebutuhan hidupnya dibiayai dan dicukupi oleh Tergugat dan istrinya sebagai orangtuanya;
 - 9) Bahwa setelah 1 (satu) tahun XXXX dan bayinya bernama XXXX tinggal bersama Penggugat, kemudian tiba-tiba ada Pamong Desa datang kerumah untuk mengantarkan XXXX pulang dalam keadaan sakit parah, bersama dengan bayinya XXXX, tanpa diantar oleh

Penggugat yang katanya mengaku sebagai suaminya, tapi tidak ada tanggung jawabnya.

10) Bahwa keesokan harinya XXXX meninggal dunia Penggugat pun tidak hadir takziah.

- d. Bahwa benar setelah XXXX dan Ibunya XXXX istri Tergugat meninggal dunia, XXXX dirawat, dididik dan diasuh oleh Tergugat sampai dengan sekarang;
- e. Bahwa gugatan hak asuh anak ini diajukan karena ada maksud-maksud terselubung baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun orang lain berkaitan dengan harta warisan istri Tergugat, maka demi menyelamatkan cucu Tergugat (XXXX) Tergugat memilih keluar dari rumah harta warisan istri Tergugat yang sekarang sudah berhasil dikuasai oleh saudara-saudaranya. Jadi alasan Penggugat akan merawat dan mendidik dan mengasuh anaknya XXXX tersebut hanyalah alasan yang dibuat-buat dan alasan yang konyol sebab dahulu selagi masih bayi Penggugat tidak banyak membutuhkan biaya saja Penggugat tidak mampu dan tidak mau menghidupi dan membiayainya;
 - XXXX yang katanya istrinya selama bersama Penggugat hidup dalam ketakutan. Hidup dalam tekanan dan tidak boleh bergaul dengan masyarakat maupun menghubungi keluarganya;
 - Sikap dan perilaku Penggugat yang kasar dan sering melakukan penganiayaan dan kekerasan terhadap XXXX istrinya sehingga sampai sakit parah dan meninggal dunia;

Oleh karenanya Tergugat sudah kehilangan anak (XXXX) maka tidak mau kehilangan cucu lagi (XXXX) yang tidak kurang kasih sayang, perhatian, pendidikan dan biaya hidup, justru bila XXXX berada dibawah asuhan Penggugat dikhawatirkan akan mengalami hal yang sama dengan ibunya (XXXX) apalagi Penggugat sendiri sudah mempunyai istri dan anak, otomatis akan lebih memperhatikan istri dan anak-anaknya sendiri; Toh anak juga lebih bisa merasakah dimana dia mendapatkan keamanan dan kenyamanan dimana dia tinggal, dan anak nanti kalau sudah besar akan mencari ayahnya sendiri;

- f. Bahwa tidak benar Tergugat melarang Penggugat bertemu dan bermain dengan anaknya XXXX, sepanjang dengan cara dan perlakuan secara baik-baik;
- g. Bahwa meskipun Penggugat selaku Ayah kandung XXXX, akan tetapi tidak layak dan tidak patut untuk mengasuh dan merawat serta mendidik anaknya, mengingat dari bayi lahir Penggugat sama sekali tidak hadir dan tidak datang menunggui istrinya berjuang antara hidup dan mati untuk melahirkan anaknya tersebut;

Bahwa sampai saat anak mau menginjak umur 10 tahun Penggugat selaku Ayah kandungnya membelikan susu atau pakaian sehalaiapun tidak. Justru Tergugat mengkhawatirkan nasib XXXX apabila dibawah asuh Penggugat akan bernasib sama dengan ibunya (XXXX) dan akan berpengaruh pada psikologis anak;

- h. Bahwa XXXX sudah diadopsi dan diangkat anak oleh istri Tergugat XXXX, maka Tergugat juga berhak atas anak yang dilahirkan;

- i. Bahwa kondisi Tergugat sebagai pensiunan TNI-AD baik secara psikis maupun secara finansial lebih layak mengasuh XXXX untuk pertumbuhan dan perkembangan anak;
- j. Bahwa Tergugat menolak dalil posita gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.⁵³

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kirannya memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Menetapkan Hak asuh anak bernama XXXX jatuh kepada Tergugat XXXX;
- c. Membebaskan biaya perkara menurut h kum;

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya.⁵⁴

4. Tahap Keempat, Replik

Kesempatan Penggugat untuk menanggapi jawaban Tergugat, baik secara lisan maupun tertulis. Terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil Tergugat, terkecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
- b. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Juli 2009 telah terjadi pernikahan yang sah antara saya (Penggugat) PENGGUGAT (Penggugat) dengan XXXX Binti TERGUGAT (Ayah Angkat) sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 553/71/VII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, Saya (Penggugat) yakin bahwa Kantor Urusan Agama mengeluarkan Akta Nikah berdasarkan dokumen permohonan nikah (Model N1 sampai dengan N.7) yang diantaranya memuat tentang keterangan orangtua dan persetujuan orangtua yang disertai pula dokumen kependudukan dari pemohon nikah. Artinya apabila ada kesalahan nama orangtua atau apapun, berawal dari dokumen kependudukan yang dimiliki dan diserahkan sebagai persyaratan permohonan nikah, dalam hal ini dokumen kependudukan tersebut diberikan oleh pihak keluarga TERGUGAT (Tergugat);

⁵³ *Ibid*, hlm. 4-7.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 7.

- c. Bahwa benar TERGUGAT (Tergugat) bukan ayah kandung maupun ayah angkat almarhumah RINAH alias RINA MARIANA alias XXXX dan bukan pula XXXX, karena XXXX adalah nama Ibu Kandung Almarhumah XXXX sebagaimana dokumen Surat Kelahiran yang dimiliki Almarhumah XXXX. Saya (Penggugat) sebagai suami setelah menikah dengan XXXX baru mengetahui bahwa ayah kandung XXXX bernama XXXX (Almarhum) yang meninggal sewaktu XXXX masih dalam usia kandungan 3 (tiga) bulan;
- d. Bahwa benar XXXX Binti XXXX pada saat menikah dalam keadaan hamil 8 bulan. Namun hal ini menurut saya (Penggugat) tidak membatalkan sahnya pernikahan saya (Penggugat) dengan XXXX, sebagaimana peraturan pemerintah dalam Kompilasi Hukum Islam (INPRES No. 1 Tahun 1999) dalam Pasal 53;
 - 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
 - 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
 - 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir;
- e. Bahwa Tidak Benar Almarhum SAKRIB yang menjadi Wali Nikah karena yang menjadi Wali Nikah adalah M. NASIRUDIN, S.Pd.I selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 553/71/VII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes;
- f. Bahwa Tidak Benar perkawinan tersebut dilaksanakan karena hubungan pemerkosaan. Hal ini didasari atas pemeriksaan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian. Perlu diketahui bahwa saya (Penggugat) kurang lebih 3 (tiga) minggu setelah pernikahan (hari dan tanggal lupa), saya (Penggugat) didatangi oleh anggota Reskrim Polsek Jatibarang di tempat saya (Penggugat) bekerja (PG. Jatibarang) dan dibawa ke Mapolsek Jatibarang untuk diambil keterangannya dalam dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh saya (Penggugat) terhadap XXXX Binti XXXX, namun dugaan tersebut tidak terbukti dan akhirnya saya (Penggugat) dibebaskan;
- g. Bahwa benar pada tanggal 30 Maret 1984 jam 09.00 WIB, RINAH alias RINA MARIANA Binti XXXX (Nama pemberian orangtua kandung Almarhumah XXXX sedangkan nama XXXX diberikan oleh orangtua angkatnya) diangkat anak oleh XXXX alias XXXX alias XXXX alias JUGAR istri dari XXXX (Almarhum);
- h. Bahwa tidak benar saya (Penggugat) setelah menikah pergi meninggalkan istri saya (Penggugat), namun yang terjadi adalah bahwa 3 (tiga) hari sebelum terjadinya akad nikah saya (Penggugat) dipanggil oleh Tergugat di rumah Istri Tergugat yang intinya bahwa saya (Penggugat) boleh menikahi XXXX dengan syarat setelah proses akad nikah saya (Penggugat) harus meninggalkan XXXX selama-lamanya dan setelah kelahiran bayi dalam kandungan XXXX lahir, anak tersebut akan diadopsi oleh Tergugat dan apabila saya (Penggugat) ingin melihat anak kandung saya (XXXX) cukup dari jalan raya saja. Hal tersebut juga ditegaskan kembali oleh Almarhum

SAKRIB selaku Kaur Kesra (Lebe) dihadapan keluarga saya (Penggugat) dan perangkat desa lain pada saat sebelum keberangkatan saya (Penggugat) dan keluarga ke kediaman istri Tergugat untuk melaksanakan akad nikah bahwa setelah proses akad nikah, saya (Penggugat) harus langsung pulang dan tidak usah membawa barang pemberian apapun untuk XXXX (seserahan);

- i. Bahwa benar belum sebulan setelah pernikahan istri saya (XXXX) melahirkan anak laki-laki. Bahwa benar saya (Penggugat) selaku suami XXXX tidak menunggu proses persalinan anak saya. Bagaimana mungkin saya (Penggugat) bisa menunggu proses kelahiran anak saya (XXXX), sedangkan saya (Penggugat) dilarang Tergugat menemui istri saya. Namun Saya (Penggugat) sebagai suami XXXX setelah mendengar kabar persalinan istri saya dari keluarga Tergugat, saya (Penggugat) berusaha untuk menjenguk dan memberikan uang kepada Istri Tergugat sebagai biaya persalinan namun ditolak oleh Istri Tergugat;
- j. Tergugat menyatakan sebagaimana poin 3 (tiga) sub 3), bahwa saya (Penggugat) menculik istri dan anak kandung saya (XXXX). Itu tidak benar yang sebenarnya terjadi adalah bahwa pada saat anak saya (XXXX) berusia 40 hari, Istri saya (XXXX) dan anak saya (XXXX) atas kemauan sendiri datang kerumah keluarga saya (Penggugat) pada pagi hari setelah Shubuh sekira pukul 04.30 WIB. XXXX pada saat itu menceritakan, dia naik ojek ke rumah keluarga saya (Penggugat). Diceritakan pula bahwa dia keluar dari rumah dan yang membukakan pintu rumah adalah SUNARTI ALIAS LINDA BINTI SUHARI ALIAS JUGAR yang merupakan adik kandung dari istri Tergugat. Kemudian XXXX berjalan kaki ke arah PG. Jatibarang dimana disitu terdapat pangkalan ojek, lalu naik ojek kerumah saya (Penggugat);
- k. Bahwa tidak benar kalau Tergugat datang dan menjemput Istri beserta anak kandung saya (XXXX) dirumah saya (Penggugat) sebagaimana Tergugat nyatakakan pada poin 3 (tiga) sub 4). Yang sebenarnya terjadi adalah sekira seminggu kemudian setelah kedatangan Istri dan anak kandung saya (XXXX), saya (Penggugat) didatangi oleh Perangkat Desa SAKRIB (Almarhum) yang meminta saya (Penggugat) menemui Tergugat dirumah istri Tergugat, pada awalnya saya (Penggugat) tidak mau kalau dipertemukan dirumah istri Tergugat, kalau mau dipertemukan di balaidesa. Tetapi atas saran dari Perangkat Desa SAKRIB (almarhum) akhirnya saya (Penggugat) dipertemukan di rumah istri Tergugat dengan didampingi dan disaksikan oleh perangkat desa dan Bhabinkamtibmas (AIPTU SUPARJI), dalam pertemuan tersebut ditanyakan kepada Almarhumah XXXX akan ikut siapa? Dan XXXX memilih ikut dengan saya (Penggugat) selaku suaminya. Akan tetapi sebelum XXXX dibawa pulang oleh saya (Penggugat), XXXX dibawa masuk ruang tengah rumah dengan ditarik tangannya oleh Tergugat. Setelah keluar dari ruang tengah, XXXX berubah pikiran dan memilih ikut dengan orangtua angkatnya;
- l. Tergugat menyatakan dalam poin 3 (tiga) sub 5), bahwa 3 (tiga) bulan kemudian saya (Penggugat) menculik istri dan anak kandung saya (Penggugat). Hal tersebut tidak benar yang sebenarnya adalah istri saya

(XXXX) dan anak saya (XXXX) atas kemauan sendiri datang kerumah saya (Penggugat) pada pagi hari sekira pukul 05.30 WIB dengan naik becak. Selang beberapa saat sekira pukul 05. 45 WIB, Tergugat datang kerumah saya (Penggugat) dan meminta XXXX untuk pulang, namun XXXX tidak mau pulang kerumah orangtua angkatnya. Pada saat itu Tergugat marah dan dihadapan saya (Penggugat) dan Keluarga saya Tergugat menampar istri saya (XXXX), kemudian atas kejadian tersebut, Tergugat saya usir dari rumah saya (Penggugat). Tergugat kemudian pergi dari rumah saya (Penggugat), sembari mengatakan kepada istri saya (XXXX) agar tidak usah mengakui Tergugat sebagai orang tuanya. Atas kejadian tersebut sekira pukul 06.15 WIB saya (Penggugat) memanggil Sdr. XXXX selaku saudara saya (Penggugat) yang kebetulan juga Ketua RT dan sekarang menjabat Perangkat Desa Karanglo (Kepala Dusun II). Kemudian sekira pukul 06.30 WIB Sdr. XXXX datang dan menanyakan kronologis kejadian. Sehubungan ada bukti tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh Tergugat yaitu luka memar dipipi istri saya (XXXX), Sdr. XXXX dengan menggunakan handphone (HP) dan suara HP sengaja dikeraskan (diloudspeaker) melaporkan dan meminta saran atas kejadian tersebut kepada anggota Reskrim Polsek Jatibarang, menurut Sdr. XXXX yang menerima laporan adalah BRIGADIR RAHMADI HIDAYAT. Setelah itu Sdr. XXXX menanyakan kepada istri saya (XXXX) apakah istri saya (XXXX) akan melaporkan secara tertulis ke pihak Kepolisian, dan dijawab oleh istri saya (XXXX) masih bingung karena masih merasa pusing akibat tindak kekerasan yang dilakukan Tergugat. Atas saran Sdr. XXXX sebaiknya kejadian tersebut tidak usah dilaporkan secara tertulis ke Pihak Kepolisian karena bagaimanapun juga Tergugat adalah orangtua istri saya (XXXX), dan sebagai itikad baik kepada orangtua istri saya (XXXX), karena pernikahan saya (Penggugat) dan istri saya (XXXX) diawali dari hal yang tidak sepatutnya walaupun atas dasar suka sama suka;

- m. Bahwa tidak benar XXXX keluar dari rumah saya (Penggugat) ke rumah Tergugat meloloskan diri tetapi yang sebenarnya adalah XXXX datang menemui orangtua angkatnya atas seijin saya (Penggugat) sekedar untuk melepas kerinduan hanya kepada ibu angkatnya (bukan suami ibu angkatnya/Tergugat). Istri saya (XXXX) tidak mau mengajak anak kandung kami (XXXX). Istri saya (XXXX) beralasan apabila anak saya (XXXX) diajak pasti dia (XXXX) tidak diperbolehkan pulang ke rumah saya (Penggugat) lagi. Karena istri saya (Penggugat) tidak mau dipisahkan dari saya (Penggugat);
- n. Tergugat menyatakan dalam poin 3 (tiga sub 8), bahwa XXXX dan anak kandung kami (XXXX) ikut dengan saya (Penggugat) kebutuhan hidup kami dibiayai oleh Tergugat. Pernyataan Tergugat bahwa selama XXXX tinggal dengan saya (Penggugat) dibiayai kebutuhan hidupnya oleh Tergugat. Pernyataan tersebut adalah kebohongan belaka yang sangat dipaksakan untuk membenaran diri Tergugat sebagai alibi bahwa Tergugat layak untuk mendapatkan hak asuh atas anak kandung saya (XXXX). Karena selama XXXX tinggal bersama saya (Penggugat), Tergugat belum pernah datang untuk menengok yang diakuinya sebagai anak angkat

maupun cucunya. Tergugat datang hanya untuk memaksa istri saya (XXXX) kembali ke rumah istri Tergugat dengan cara kekerasan dan intimidasi, yang tanpa disadari Tergugat membuat Istri saya (XXXX) semakin membenci Tergugat;

- o. Bahwa setelah sekira 18 (delapan belas) bulan XXXX tinggal bersama saya (Penggugat), XXXX sakit, dimana penyakit (batuk berdarah) yang diderita Almarhum XXXX sudah diderita sebelum menikah dengan saya (Penggugat). Saya (Penggugat) selaku suami sudah berusaha berbagai cara untuk mengobati sakit yang diderita istri saya (XXXX) termasuk dengan melakukan pengobatan rutin ke dr. RITA yang beralamat di depan Pasar Jatibarang. Seminggu sebelum kematian, istri saya (XXXX) meminta izin kepada saya (Penggugat) agar bisa bertemu dengan ibu angkat istri saya (XXXX alias XXXX alias XXXX alias JUGAR), atas permohonan istri saya (XXXX), saya (Penggugat) melaporkan kepada perangkat desa bahwa kondisi istri saya (XXXX) sedang sakit dan ingin bertemu dengan Ibu Angkatnya. Selang beberapa hari setelah saya (Penggugat) melaporkan kepada perangkat desa, saya (Penggugat) didatangi perangkat Desa SAKRIB (Almarhum) yang mengatakan XXXX boleh bertemu dengan ibu angkatnya dengan syarat harus membawa anak kandung saya (XXXX). Kalau anak kandung saya (XXXX) tidak dibawa Tergugat tidak mengijinkan XXXX bertemu dengan ibu angkatnya. Pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2011 sekira pukul 10.00 WIB, sesuai dengan permintaan XXXX, saya (Penggugat) dan ibu kandung saya XXXX dengan didampingi oleh Ketua RT dan Perangkat Desa mengantar XXXX beserta anak kandung saya (XXXX) ke rumah Istri Tergugat. Jadi sangat tidak beralasan kalau Tergugat mengatakan bahwa saya (Penggugat) tidak ikut mengantar istri saya (XXXX) dan sekali lagi yang dinyatakan Tergugat adalah kebohongan belaka yang sangat dipaksakan untuk membenaran diri Tergugat sebagai alibi bahwa Tergugat layak untuk mendapatkan hak asuh atas anak kandung saya (XXXX);
- p. Bahwa pada Hari Selasa tanggal 15 Maret 2011, istri saya (XXXX Binti XXXX) meninggal dunia dirumah Istri Tergugat. Bahwa tidak benar kalau Tergugat mengatakan Saya (Penggugat) (Penggugat) tidak hadir takziah, faktanya dengan disaksikan banyak pelayat, saya (Penggugat) hadir bersama dengan keluarga saya (Penggugat) dan yang memandikan jenazah Almarhum XXXX Binti XXXX adalah Ibu Kandung Saya (Penggugat) XXXX dan kakak Kandung Saya (Penggugat) XXXX;
- q. Bahwa dikatakan oleh Tergugat bahwa Gugatan Hak Asuh Anak ini diajukan karena ada maksud terselubung untuk kepentingan saya (Penggugat) maupun orang lain berkaitan dengan harta warisan peninggalan Istri Tergugat adalah sangat-sangat konyol karena setelah 40 hari meninggalnya Almarhumah istri saya (XXXX XXXX) saya (Penggugat) dan ibu kandung saya, datang kerumah istri Tergugat dengan maksud untuk mengambil anak kandung saya (XXXX) namun tidak diperbolehkan dengan alasan sebagai penghibur sepeninggal istri saya (XXXX) dan apabila saya (Penggugat) kangen dengan anak kandung saya (XXXX), akan diantar kerumah saya (Penggugat), namun hal tersebut tidak

pernah ditepati. Selang 2 (dua) bulan kemudian saya (Penggugat) meminta bantuan kepada pemerintah desa agar saya (Penggugat) bisa mengambil anak kandung saya (XXXX) yang dalam penguasaan Tergugat. Atas permintaan tersebut kemudian saya (Penggugat) dan ibu kandung saya, didampingi perangkat desa serta AIPTU SUPARJI selaku Bhabinkamtibmas Desa Karanglo mendatangi kembali rumah istri Tergugat dengan tujuan yang sama yaitu untuk mengambil anak kandung saya (XXXX), namun tanggapan Tergugat diluar dugaan, dengan sangat arogan dihadapan perangkat desa dan Bhabinkamtibmas Tergugat mengancam akan membunuh saya (Penggugat) dan Ibu Kandung saya apabila saya (Penggugat) mengambil anak kandung saya (XXXX), karena situasi yang tidak kondusif akhirnya saya (Penggugat) disarankan pulang oleh Bhabinkamtibmas. Sehari setelahnya saya (Penggugat) laporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian dan diterima oleh Kanit Reskrim Polsek Jatibarang (AIPTU SODIKIN). Setelah dilaporkan ke Pihak Kepolisian selang 3 (tiga) hari kemudian saya (Penggugat) dipertemukan dengan Tergugat di Polsek Jatibarang guna mediasi, dalam mediasi yang dimediator Kanit Reskrim Polsek Jatibarang saat itu, Tergugat mengaku bahwa Tergugat mengancam membunuh Saya (Penggugat) dan Ibu Kandung saya dalam keadaan emosi hingga tidak bisa mengontrol ucapan. Dalam mediasi tersebut juga, Tergugat mengatakan bahwa apabila anak kandung saya (XXXX) diasuh oleh Tergugat, nantinya semua harta peninggalan istri Tergugat akan diatasnamakan anak kandung saya (XXXX). Namun sebagai ayah kandung XXXX, saya (Penggugat) dengan tegas menolak tawaran tersebut yang terpenting bagi saya (Penggugat) adalah agar bisa merawat dan mengasuh anak kandung saya (XXXX). Artinya apa yang dikatakan oleh Tergugat bertolak belakang dengan fakta sebenarnya, bahwa Tergugat sendiri yang mempunyai maksud terselubung untuk kepentingan Tergugat sendiri. Tergugat menguasai anak kandung saya (XXXX) hanya agar bisa mendapatkan atau menguasai harta peninggalan istri Tergugat. Saya (Penggugat) semakin yakin bahwa Tergugat menguasai anak kandung saya (XXXX) hanya untuk mendapatkan harta peninggalan atas meninggalnya istri Tergugat setelah sidang mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Brebes pada hari Senin tanggal 10 (sepuluh) bulan Desember tahun 2018 (dua ribu delapan belas) yang membahas tentang Hak Asuh Anak bukannya membahas tentang harta waris, Tergugat menanyakan kepada Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Brebes, Apakah cucu saya (XXXX) mendapatkan hak waris atas meninggalnya istri Tergugat sedangkan mediasi tersebut, yang dijawab oleh mediator bahwa cucu Tergugat (XXXX) mempunyai hak atas harta peninggalan istri Tergugat (ALMARHUMAH XXXX ALIAS XXXX ALIAS XXXX ALIAS JUGAR);

- r. Tergugat juga menyatakan bahwa XXXX selama hidup bersama dengan saya (Penggugat) hidup dalam ketakutan, hidup dalam tekanan dan tidak boleh bergaul dengan masyarakat maupun menghubungi keluarganya tidaklah benar, karena semasa hidup dengan saya (Penggugat), istri saya (XXXX) bebas bercengkerama dengan tetangga sambil mengasuh anak

kami (XXXX) sebagaimana umumnya kehidupan di desa. Memang benar istri saya (XXXX) tidak pernah menghubungi keluarganya (Orangtua angkatnya), itu karena istri saya (XXXX) merasa takut terhadap Tergugat. Pernyataan Tergugat yang menyatakan bahwa saya (Penggugat) mempunyai sikap dan perilaku kasar terhadap istri saya (XXXX) adalah fitnah belaka. Justru Tergugat sendiri yang mempunyai perilaku kasar terhadap Istri saya (XXXX) dan saya sendiri (Penggugat). Ini dapat dibuktikan, sekira 2 (dua) minggu saya (Penggugat) menikah dengan XXXX, Tergugat mendatangi saya (Penggugat) ditempat bekerja saya (PG. Jatibarang) dan dihadapan rekan-rekan kerja saya (Penggugat) melakukan pemukulan terhadap saya (Penggugat) dengan alasan saya (Penggugat) menelpon istri saya (XXXX). Mungkin karena takut kejadian tersebut saya (penggugat) laporkan ke pihak Kepolisian, Tergugat mendahului melaporkan saya (penggugat) ke Pihak Kepolisian dengan tuduhan Pemerkosaan;

- s. Sedangkan pernyataan tentang kematian istri saya (XXXX) tidak disebabkan sebagaimana dinyatakan Tergugat. Istri saya (XXXX), menurut dr. RITA (dokter tempat istri saya menjalani pengobatan rutin) menderita penyakit LEVER dan PARU-PARU. Dan sakit itupun diderita istri saya (XXXX) sebelum menikah dengan saya (penggugat). Sebelum menikah dengan saya (Penggugat), XXXX sudah sering batuk berdarah dan rambut rontok (botak). Jadi ketakutan Tergugat apabila anak kandung saya (XXXX) diasuh saya (Penggugat) akan mengalami hal yang sama dengan ibunya (XXXX) sangat tidak beralasan;
- t. Bahwa benar saat ini saya (Penggugat) telah menikah lagi dengan XXXX, janda beranak 1 (satu). Justru istri saya yang sekarang (XXXX), sangat mendukung agar anak kandung saya dari pernikahan yang terdahulu (XXXX) bisa diasuh olehnya dan ayah kandungnya (Penggugat);
- u. Tergugat menyatakan dalam poin 7 (tujuh) bahwa sampai dengan usia 10 tahun anak kandung saya (XXXX), saya (Penggugat) tidak pernah membelikan susu atau pakaian sehalapapun. Pernyataan Tergugat sama sekali tidak benar, karena selama almarhumah istri saya dan anak kandung saya (XXXX) tinggal dengan saya (Penggugat) Kebutuhan hidup istri dan anak kandung saya, dipenuhi oleh saya (Penggugat). Dan selama anak kandung saya (XXXX) dalam penguasaan Tergugat, baik saya (Penggugat) sendiri ataupun melalui XXXX yang merupakan nenek saya (Penggugat) tetap memberikan perhatian pada anak kandung saya (XXXX) dengan memberikan susu, kue, pakaian, sepatu dan uang jajan kepada anak kandung saya (XXXX) yang diterima istri Tergugat;
- v. Dalam poin 8 (delapan) Tergugat menyatakan bahwa XXXX sudah diadopsi oleh dan diangkat anak oleh istri tergugat, maka Tergugat juga berhak atas anak yang dilahirkan. Pernyataan tersebut tidak sesuai dengan peraturan pemerintah sebagaimana tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam (INPRES NO. 1 Tahun 1999) Pasal 156 huruf (a) menyebutkan “anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: 1. Wanita wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu 2. Ayah 3. Wanita-wanita

dalam garis lurus ke atas dari ayah 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;

- w. Dalam poin 9 (sembilan) Tergugat menyatakan sebagai Pensiunan TNI-AD baik secara Psikis dan Finansial lebih layak mengasuh anak kandung saya (XXXX), saya (Penggugat) memohon kepada Majelis Hakim dapat menilai bagaimana psikis anak kandung saya (XXXX) kedepan apabila diasuh oleh orang yang mempunyai perilaku kasar, mementingkan diri sendiri dengan memutarbalikan fakta untuk kepentingan Tergugat semata. Mampu secara Finansial darimana? Karena setelah dipaksa keluar oleh adik-adik Istri Tergugat, saat ini Tergugat tinggal entah dimana karena Tergugat tidak lagi berdomisili di Desa Karanglo. Saya (Penggugat) mengkhawatirkan pertumbuhan dan pendidikan anak kandung saya (XXXX) karena anak kandung saya dibawa berpindah-pindah tempat tinggal.⁵⁵

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, saya (Penggugat) mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Menetapkan anak Kandung saya (Penggugat) yang bernama XXXX dirawat, dipelihara dan diasuh oleh Penggugat selaku Ayah Kandungnya;
- c. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Anak Kandung saya yang bernama XXXX BIN SULTONI kepada Penggugat;
- d. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).⁵⁶

5. Tahap Kelima, Duplik

Kesempatan Tergugat untuk menjawab kembali tanggapan (replik) Penggugat, baik secara lisan maupun tertulis. Terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang isinya mempertegas jawaban tersebut dengan menyatakan tetap dengan jawaban semula dengan

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 8-17.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 17-18.

menolak gugatan Penggugat dan menetapkan hak asuh anak bernama XXXX jatuh kepada Tergugat.

6. Tahap Keenam, Pembuktian

Jika setelah penyampaian Duplik oleh Tergugat, tidak ada tanggapan lagi dari Penggugat, maka acara jawab-menjawab dianggap telah selesai dan pemeriksaan dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu pembuktian. Pada tahap ini baik Penggugat akan dimintakan bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dan Tergugat akan dimintakan bukti untuk menguatkan bantahannya.

Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 33290715810009 atas nama Penggugat, tanggal 18 April 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3329072703110146 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, tanggal 21 Juni 2013, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
- c. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 553/71/VII/2009 dari KUA Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes tanggal 27 Juli 2009, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 35424/G/2009 an. XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, tanggal 26 Agustus 2009 (Bukti P.4);
- e. Fotokopi Surat Kematian No. 145/71/XI/2018 an. XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karanglo Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes tanggal 16 Nopember 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
- f. Fotokopi Surat Kelahiran No.13/84 an. Rinah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Danasari Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes tanggal 1 Februari 1984, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
- g. Surat Pernyataan dari pihak pertama XXXX alias XXXX untuk menyerahkan anaknya yang bernama Rina Hariana, umur 2 bulan kepada pihak kedua XXXX (XXXX) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7).

Saksi:

- a. XXXX, umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Brebes, di bawah sumpahnya memberikan keterangan, terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan keterangan saksi tersebut, namun Tergugat menjelaskan bahwa Penggugat memberi uang kepada anaknya bukan setiap bulan, tetapi yang benar kadang kalanya sekali 3 bulan dan 4 bulan, bahwa Istri Penggugat tinggal dengan Penggugat setelah anak berumur 40 hari sampai anak berumur 1 tahun;
- b. XXXX, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Brebes, di bawah sumpahnya memberikan keterangan, terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan keterangan saksi tersebut, bahkan Tergugat menjelaskan istri Penggugat diantarkan ke rumah Tergugat, meninggalnya bukan 3 hari setelah diantarkan, tetapi 1 hari kemudian baru meninggal dunia (diantar hari Senin, hari Selasa meninggal);
- c. XXXX, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, di bawah sumpahnya memberikan keterangan, terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan keterangan saksi tersebut.⁵⁷

Penggugat juga menghadirkan istrinya dan mengaku bernama Suyanti binti Jasmin, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Jl. Tanggul Asri RT.008 RW.002, Kelurahan Pedurungan Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan, terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan. Kemudian Tergugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. TERGUGAT Nomor 09.5003.060860.0389 tanggal 12 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda (Bukti T.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. XXXX Nomor 3171035604580005 tanggal 08 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 18-23.

oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda (Bukti T.2);

- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Moch. Yusuf dan XXXX Nomor P14.01/683/68/IX/1993 tanggal 25 September 1993 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda (Bukti T.3);
- d. Fotokopi Nomor Pokok Penduduk an. XXXX Mardiyansih Nomor 570.984.157 tanggal 22 Pebruari 1994 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda (Bukti T.4);
- e. Fotokopi Kartu Keluarga Tergugat Nomor 301.415 tanggal 24 Januari 1994 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda (Bukti T.5);
- f. Fotokopi Surat Keterangan Domisili an. TERGUGAT Nomor 145/83 tanggal 10 November 2016 yang dikeluarkan oleh Desa Karanglo Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda (Bukti T.6);
- g. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP-el an. Marwi Nomor 3329/SKT/20180820/00561 tanggal 20 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda (Bukti T.7);
- h. Fotokopi Kartu Keluarga an. Marwi Nomor 3329070901130007 tanggal 19 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda (Bukti T.8);
- i. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Ubaidilah Yusup Nomor 3329-LT-24062016-0058 tanggal 24 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda (Bukti T.9);
- j. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Marwi Nomor 472.12/32/XI/2018 tanggal 06 November 2018 yang dikeluarkan oleh Desa Karanglo Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda (Bukti T.10);

Saksi:

- a. XXXX, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tukang Becak, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Brebes. Di bawah sumpahnya memberi

keterangan, terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat membenarkan;

- b. XXXX, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Brebes . Di bawah sumpahnya memberi keterangan, terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat/kuasanya dan Penggugat pada dasarnya tidak membantah.⁵⁸

Bahwa Tergugat juga menghadirkan anak Penggugat dipersidangan dan memberi keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa saya bernama XXXX dan sekarang sudah berumur 10 tahun;
- b. Bahwa bapak saya bernama Sultoni dan ibu saya bernama XXXX;
- c. Bahwa ibu saya telah meninggal dunia dan saya sejak kecil tinggal bersama bapak angkat (nenek angkat) saya bernama TERGUGAT ;
- d. Bahwa saya menyatakan tetap ingin tinggal bersama Tergugat (TERGUGAT) sebagai kakek angkat.⁵⁹

7. Tahap Ketujuh, Kesimpulan

Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan akhir terhadap perkara yang sedang diperiksa. Berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2009 Penggugat (PENGGUGAT) telah melangsungkan pernikahan dengan XXXX binti XXXX yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, pada tanggal 27 Juli 2009;
- b. Bahwa antara PENGGUGAT dengan XXXX binti XXXX dikaruniai seorang anak bernama XXXX, lahir tanggal 17 Agustus 2009 di rumah orangtua angkat XXXX;
- c. Bahwa pada tahun 1984 XXXX alias Rina Mariana diserahkan oleh ibunya kepada XXXX (sebagai ibu angkat) karena ibunya tidak sanggup untuk merawat dan memelihara terhadap anaknya;
- d. Bahwa sejak umur anak 3 bulan, istri Penggugat dan anaknya tinggal bersama dengan Penggugat sampai anak berumur lebih 1 tahun, kemudian istri Penggugat dijemput oleh Tergugat dan tinggal dengan Tergugat;
- e. Bahwa setelah 3 bulan kemudian, istri Penggugat tinggal bersama lagi dengan Penggugat sampai anak berumur 2 tahun;
- f. Bahwa pada bulan Maret 2011 istri Penggugat (XXXX binti XXXX) karena sakit parah dan diantar ke rumah orangtua angkatnya karena ingin bertemu dengan orangtua angkatnya, akhirnya Istri Penggugat meninggal

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 23-26.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 27.

dunia pada tanggal 15 Maret 2011 di rumah Tergugat (orangtau angkat), anak Penggugat tersebut dipelihara oleh ibu angkatnya bernama XXXX dengan suaminya bernama TERGUGAT;

- g. Bahwa pada tanggal 04 November 2018 XXXX meninggal dunia, sehingga anak Penggugat tetap dalam penguasaan Tergugat (TERGUGAT) dari sampai sekarang anak tersebut berumur 10 tahun;
- h. Bahwa Penggugat telah berusaha meminta kepada Tergugat untuk ingin merawat anaknya, namun Tergugat dengan istrinya tidak mau memberi anak tersebut kepada Penggugat, meskipun XXXX telah meninggal dunia maka anak XXXX (XXXX) berhak dirawat, dididik dan diasuh oleh Tergugat karena dikhawatirkan anak di bawah asuhan Pengggat tidak akan terawat dengan baik, apalagi Penggugat sudah mempunyai istri dan anak, otomatis akan memperhatikan istri dan anak-anaknya sendiri.⁶⁰

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 sampai bukti P.7 yang telah memenuhi syarat formil, materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, serta 3 orang saksi, masing-masing bernama Taryumi bin Dasmad, XXXX bin Kasiri, dan Junedi bin Suyatno dan istri Penggugat telah memberi keterangan secara terpisah. Berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR, kesaksian tiga orang saksi Penggugat tersebut dimana mereka menerangkan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahui sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal dan material kesaksian, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan dapat diterima.

Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa bukti T.1 sampai bukti T.10 yang telah memenuhi syarat formil, materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, serta 2 (dua) orang saksi. Maka

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 27-28.

berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR, kesaksian dua orang saksi Tergugat tersebut dimana mereka menerangkan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahui sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan material kesaksian, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima.

Kesaksian dua orang saksi Tergugat tersebut menjelaskan bahwa Tergugat mempunyai anak angkat yang bernama XXXX, Penggugat menikah dengan XXXX dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXX, bahwa anak Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat sejak berumur 2 tahun hingga sekarang dan sudah berumur 10 tahun. Keterangan saksi-saksi Tergugat ternyata menguatkan gugatan Penggugat.

8. Tahap Kedelapan, Musyawarah Majelis

Majelis Hakim akan bermusyawarah untuk mengambil keputusan mengenai perkara yang sedang diperiksa. Dari bukti tertulis P.3 sampai dengan bukti P.7 dan kesaksian tiga orang saksi serta keterangan istri Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa XXXX Hardiansih nama aslinya adalah Rina Mariana (bukti P.7) menjelaskan bahwa pada tanggal 30 Maret 1984 ibu XXXX bernama XXXX alias XXXX telah menyerahkan anaknya kepada XXXX alias Marwi untuk dirawat karena ibunya tidak sanggup untuk merawat anak tersebut;
- b. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2009 Penggugat menikah dengan XXXX Hardiansih yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jatibangan Kabupaten Brebes tanggal 27 Juli 2009;
- c. Bahwa antara Penggugat dengan XXXX Hardiansih telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXX, lahir pada tanggal 17 Agustus 2009 di rumah orangtua angkat XXXX Hardiansih bernama XXXX alias Marwi dengan Tergugat (TERGUGAT);

- d. Bahwa istri Penggugat (XXXX) meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2011 di rumah Tergugat karena sakit, dan anak tersebut di asuh oleh orang tua angkatnya bernama XXXX bersama Tergugat;
- e. Bahwa sejak umur anak 3 bulan, istri Penggugat dan anaknya tinggal bersama dengan Penggugat sampai anak berumur lebih 1 tahun, kemudian istri Penggugat dijemput oleh Tergugat dan tinggal dengan Tergugat;
- f. Bahwa setelah 3 bulan kemudian, istri Penggugat tinggal bersama lagi dengan Penggugat sampai anak berumur 2 tahun;
- g. Bahwa pada tanggal 04 November 2018 XXXX alias Marwi (istri Tergugat) meninggal dunia, sehingga anak Penggugat dalam penguasaan Tergugat (TERGUGAT) sampai sekarang;
- h. Bahwa meskipun XXXX telah meninggal dunia maka anak XXXX berhak dirawat, dididik dan diasuh oleh Tergugat karena dikhawatirkan anak di bawah asuhan Penggugat tidak akan terawat dengan baik, apalagi Penggugat sudah mempunyai istri dan anak, otomatis akan memperhatikan istri dan anak-anaknya sendiri;
- i. Bahwa selama anak tinggal dengan orangtua angkatnya Penggugat pernah memberi nafkah kepada anak, namun tidak sepenuhnya;
- j. Bahwa Penggugat ingin mendidik, mengasuh anak hasil perkawinan Penggugat dan XXXX (armarhumah), tetapi Tergugat tidak mau menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;
- k. Bahwa istri Penggugat (Suyanti bin Jasmin) bersedia mendidik, mengasuh anak hasil perkawinan Penggugat dan XXXX (armarhumah).⁶¹

Berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR, kesaksian dua orang saksi Tergugat tersebut dimana mereka menerangkan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahui sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan material kesaksian, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi Tergugat tersebut menjelaskan bahwa Tergugat mempunyai anak angkat yang bernama XXXX, bahwa Penggugat menikah dengan XXXX dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXX, bahwa anak Penggugat tinggal bersama dengan

⁶¹ *Ibid*, hlm. 31-32.

Tergugat sejak berumur 2 tahun hingga sekarang dan sudah berumur 10 tahun.

Keterangan saksi-saksi Tergugat ternyata menguatkan gugatan Penggugat.

Berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 30 Maret 1984 ibu XXXX bernama XXXX telah menyerahkan anaknya XXXX nama aslinya adalah Rina Mariana sebagaimana bukti P.7 kepada XXXX alias Marwi untuk dirawat, dan diasuh karena ibunya tidak sanggup untuk merawat anak tersebut;
- b. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2009 Penggugat menikah dengan XXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jatibangan Kabupaten Brebes tanggal 27 Juli 2009 (bukti P.3);
- c. Bahwa antara Penggugat dengan XXXX telah dikaruniai seorang anak laki laki bernama XXXX, lahir tanggal 17 Agustus 2009 (Bukti P.4 dan Bukti T.9), anak tersebut lahir di rumah orangtua angkat XXXX bernama XXXX alias Marwidengan Tergugat;
- d. Bahwa sejak umur anak 3 bulan istri Penggugat dan anaknya tinggal/hidup bersama dengan Penggugat selama 1 tahun, kemudian XXXX pulang ke rumah orangtua angkatnya karena dijemput oleh Tergugat, kemudian istri Penggugat dan anaknya tinggal lagi dengan Penggugat sampai umur anak 2 tahun;
- e. Bahwa istri Penggugat (XXXX) meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2011 di rumah Tergugat karena sakit (Bukti P.5), dan anak tersebut di asuh oleh orang tua angkatnya bernama XXXX bersama Tergugat;
- f. Bahwa pada tanggal 04 November 2018 XXXX alias Marwi (istri Tergugat) meninggal dunia, sehingga anak Penggugat dalam penguasaan Tergugat (TERGUGAT) sampai sekarang;
- g. Bahwa Penggugat telah berusaha meminta kepada Tergugat untuk merawat, mendidik dan mengasuh anaknya, namun Tergugat dengan istrinya tidak mau memberi anak tersebut kepada Penggugat, dengan dalih meskipun XXXX telah meninggal dunia maka anak XXXX (XXXX) berhak dirawat, dididik dan diasuh oleh Tergugat karena dikhawatirkan anak di bawah asuhan Pengggat tidak akan terawat dengan baik, apalagi Penggugat sudah mempunyai istri dan anak, otomatis akan memperhatikan istri dan anak-anaknya sendiri;
- h. Bahwa selama anak tinggal dengan orangtua angkat (nenek angkat) Penggugat pernah memberi nafkah kepada anak.⁶²

⁶² *Ibid*, hlm. 31-32.

Penggugat mendalilkan selama pernikahan antara Penggugat dengan XXXX telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXX, lahir pada tanggal 17 Agustus 2009, kemudian istri Penggugat (XXXX) meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2011 karena sakit. Bahwa anak Penggugat diasuh oleh orangtua angkat XXXX bernama XXXX alias Marwi dengan suaminya bernama M, Yusuf (Tergugat), namun kemudian pada tanggal 4 Nopember 2018 XXXX alias Marwi meninggal dunia, sehingga anak Penggugat tersebut sampai sekarang dalam asuhan/penguasaan Tergugat (TERGUGAT) sebagai suami kedua dari XXXX alias Marwi. Oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Brebes agar pengadilan menetapkan hak asuh anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Brebes agar pengadilan menetapkan hak asuh anak bernama XXXX dalam pemeliharaan Penggugat, dengan alasan Penggugatlah yang merupakan ayah kandung dari anak tersebut, dan juga Penggugat khawatir akan mempengaruhi akan tumbuh kembang anak apabila anak tersebut berada dalam penguasaan Tergugat, apalagi istri Penggugat (XXXX) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2011;
- b. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat keberatan atas hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat sebagai ayah kandungnya karena dikhawatirkan anak di bawah asuhan Pengggat tidak akan terawat dengan baik, apalagi Penggugat sudah mempunyai istri dan anak, otomatis akan memperhatikan istri dan anak-anaknya sendiri;
- c. Bahwa berdasarkan dalil para pihak dan dikaitkan dengan bukti P.3. sampai P.7 dan bukti T.9 dan bukti T.10 serta dikuatkan dengan keterangan saksi saksi terungkap fakta bahwa Penggugat dengan XXXX sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama XXXX, lahir pada tanggal 17 Agustus 2009;
- d. Bahwa setelah meninggal istri Tergugat (XXXX alias Marwi) anak Penggugat tersebut sampai sekarang dalam asuhan/penguasaan Tergugat (TERGUGAT) dan Tergugat keberatan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat karena dikhawatirkan anak di bawah asuhan Pengggat tidak

- akan terawat dengan baik, apalagi Penggugat sudah mempunyai istri dan anak, otomatis akan memperhatikan istri dan anak-anaknya sendiri;
- e. Bahwa dalam hukum Islam, hak asuh anak dapat diberikan kepada orangtua yang masih hidup jika salah satunya meninggal atau kepada salah satu orangtua, jika terjadi perceraian. Jika kedua orangtuanya telah meninggal dunia maka dapat diberikan kepada keluarga yang terdekat;
 - f. Bahwa ketentuan mengenai pengasuhan anak diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadinya perceraian yang menyebutkan “Pemeliharaan anak yang belum *Mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”. Oleh karena ibu dari anak (XXXX) telah meninggal dunia, maka berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa apabila putusnya perkawinan karena perceraian yang berhak mengasuh anak adalah: “ Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibu-nya meninggal dunia, maka kedudukan urutannya digantikan oleh:
 - 1) Wanita-wanita dalam lurus ke atas dari ibu.
 - 2) Ayah.
 - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
 - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
 - 5) Wainta-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
 - 6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;
 - g. Bahwa oleh karena ibu-nya meninggal dunia, maka kedudukan urutan yang berhak mengasuh anak digantikan oleh wanita-wanita dalam lurus ke atas dari ibu, namun wanita-wanita dalam lurus ke atas dari ibu tidak ada, maka hak mengasuh anak otomatis digantikan oleh Penggugat (PENGGUGAT sebagai ayah kandungnya;
 - h. Bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat akan lebih terjamin anak tersebut diasuh oleh Penggugat sebagai ayah kandungnya. Dengan demikian Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXX ditetapkan kepada Penggugat sebagai ayah kandungnya;
 - i. Bahwa penetapan hak asuh anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat sebagai ayah kandungnya, namun demikian anak tersebut sudah lebih 8 tahun tinggal dan diasuh oleh Tergugat bersama istrinya, maka dilihat dari sisi kemanusiaan maka Penggugat jangan menghalangi atau memberi waktu dan kesempatan kepada Tergugat untuk membawa dan menginap bersama anaknya di rumah karena anak tersebut tetap ada hubungan pribadi antara anak dengan Tergugat sebagai orangtua angkat atau kakek angkatnya.⁶³

Tergugat menghadirkan anak Penggugat (XXXX) di persidangan dan telah memberi keterangan sebagaimana dicatat dalam berita acara persidangan,

⁶³ *Ibid*, hlm. 37-39.

namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan anak Penggugat karena anak Penggugat tersebut belum *mumayyiz*, yakni anak belum mencapai umur 12 tahun.

9. Tahap Kesembilan, Pembacaan Putusan

Majelis Hakim akan membacakan putusan hasil musyawarah Majelis Hakim, antara lain:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menetapkan anak hasil perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan istri Penggugat (XXXX) yang bernama XXXX, lahir tanggal 17 Agustus 2009 di dalam pemeliharaan Penggugat;
- c. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;
- d. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).⁶⁴

Hasil analisis penulis bahwa urutan siapa pemegang *hadhanah* ada beberapa pendapat, menurut yang dianut oleh kebanyakan ulama yaitu bila bertemu kerabat dari pihak ibu dan dari pihak ayah dan mereka semuanya memenuhi syarat yang ditentukan untuk melaksanakan *hadhanah*. Maka urutan yang dianut oleh kebanyakan ulama adalah:

1. Ibu, ibunya ibu dan seterusnya ke atas, karena menduduki kedudukan ibu.
2. Ayah, ibunya ayah dan seterusnya ke atas, karena menduduki tempatnya ayah.
3. Ibunya kakek melalui ibu, kemudian ibunya dan seterusnya ke atas.
4. Ibunya kakek melalui ayah, dan seterusnya ke atas.
5. Saudara-saudara perempuan ibu.
6. Saudara-saudara perempuan dari ayah.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 40.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan mengenai urutan-urutan siapa saja yang berhak mengasuh anak, yaitu dalam Pasal 156 huruf (a):

Anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali jika ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu
2. Ayah
3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu
6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Secara syari'at, hak *hadhanah* anak berada dipihak ibu, apalagi jika si anak dalam usia yang masih di bawah umur dan menyusui. Sedangkan secara hukum positif maupun ketentuan Hukum Islam juga mendukung bahwa seorang ibu memiliki hak *hadhanah* anak yang diutamakan. Adapun sebab hak *hadhanah* anak lebih diutamakan berada pada ibu, karena ibu pada dasarnya memiliki sifat sabar, lembut, waktu yang cukup untuk mengasuh, dan lebih menyayangi serta cinta pada anaknya. Sebaliknya, seorang bapak memiliki kewajiban merawat anak-anaknya. jika si ibu tidak memenuhi syarat untuk melakukan tugas *hadhanah*. Jadi Orang yang lebih berhak mengasuh anak saat tenggang waktu penentuan hak *hadhanah* adalah ibu dari si anak atau bila ibu tidak ada atau meninggal dunia, maka kerabat wanita dari garis keturunan ibu dapat menggantikannya.

Berdasarkan analisis penulis, dalam memutuskan perkara pemeliharaan anak pada Putusan Nomor 4836/Pdt.G/2018/PA.Bbs, majelis hakim sudah benar dalam mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan hasil perkawinan antara Penggugat dengan istri Penggugat (XXXX) yang bernama XXXX, lahir tanggal 17 Agustus 2009 di dalam pemeliharaan Penggugat. Keputusan tersebut sejalan dengan pendapat kebanyakan ulama terkait urutan pemegang hak asuh

anak (*hadhanah*), yaitu: Ibu, ibunya ibu dan seterusnya ke atas, karena mereka menduduki kedudukan ibu, kemudian baru ayah. Hal ini juga sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a), yaitu: Anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali jika ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, baru kemudian ayah.

Oleh karena ibu-nya meninggal dunia, maka kedudukan urutan yang berhak mengasuh anak digantikan oleh wanita-wanita dalam lurus ke atas dari ibu, namun wanita-wanita dalam lurus ke atas dari ibu tidak ada, maka hak mengasuh anak otomatis digantikan oleh Penggugat sebagai ayah kandungnya sehingga akan lebih terjamin anak tersebut diasuh oleh Penggugat sebagai ayah kandungnya. Majelis hakim juga sudah benar dalam melihat sisi kemanusiaan karena anak tersebut sudah lebih 8 tahun tinggal dan diasuh oleh Tergugat bersama istrinya, maka Penggugat tidak boleh menghalangi atau memberi waktu dan kesempatan kepada Tergugat untuk membawa dan menginap bersama anaknya di rumah karena anak tersebut tetap ada hubungan pribadi antara anak dengan Tergugat sebagai orangtua angkat atau kakek angkatnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan atas analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan hak asuh anak di bawah umur setelah ibunya meninggal dunia dalam perspektif hukum Islam, menurut pendapat kebanyakan ulama terkait urutan pemegang hak asuh anak (*hadhanah*), yaitu: Ibu, ibunya ibu dan seterusnya ke atas, karena mereka menduduki kedudukan ibu, kemudian baru ayah dan seterusnya. diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 KHI ayat (1), yaitu anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan dengan memberikan urutan yang berhak mengasuh anak, yaitu wanita-wanita dalam garis lurus dari Ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu, dan wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
2. Penyelesaian sengketa hak asuh anak di bawah umur setelah ibunya meninggal dunia di Pengadilan Agama Brebes pada perkara Nomor: 4836/Pdt.G/2018/PA.Bbs, majelis hakim sudah benar dalam mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan hasil perkawinan antara Penggugat dengan istri Penggugat (XXXX) yang bernama XXXX, lahir tanggal 17 Agustus 2009 di dalam pemeliharaan Penggugat. Oleh karena ibu-nya meninggal dunia, maka

kedudukan urutan yang berhak mengasuh anak digantikan oleh wanita-wanita dalam lurus ke atas dari ibu, namun wanita-wanita dalam lurus ke atas dari ibu tidak ada, maka hak mengasuh anak otomatis digantikan oleh Penggugat sebagai ayah kandungnya. Keputusan tersebut sejalan dengan pendapat kebanyakan ulama terkait urutan pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) dan ketentuan Pasal 156 huruf (a).

B. Saran-Saran

1. Hakim dalam menetapkan putusan hak asuh terhadap anak di bawah umur 12 tahun (belum *mumayyiz*) hendaklah juga memperhatikan faktor psikologis dari anak yang akan lebih baik bila diasuh oleh ibunya dengan pertimbangan seorang anak dalam umur tersebut masih sangat membutuhkan seorang ibu. Namun apabila ibunya telah meninggal dunia perlu dipertimbangkan dari berbagai aspek agar pemegang hak asuh anak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika terjadi perselisihan maka Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula dengan urutan wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, dan seterusnya.
2. Orang tua yang bercerai atau orang tuanya meninggal dunia, hendaklah tidak melibatkan anak dalam urusan perselisihan keluarga sehingga hak-hak anak untuk tetap memperoleh kasih sayang dari orang tuanya atau pemegang hak asuh yang tepat tetap terpenuhi tanpa terjadi sengketa perselisihan hak anak di pengadilan agama namun dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Alam, Andi Syamsu & Fauzan, M., *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Pena Media, 2008.
- Al-Bukhari, *Sahih Bukhari Jus 11*, Beirut: Darul Fikri, tt.
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fikih Sunnah Syyyaid Sabiq*, Penerjemah Tirmidzi, dkk, AM Waskito, dkk., (ed.), Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Al-Ghazali, Abd. Rahman, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Al-Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Ba'alawi, Abdurrahman Ibn Umar, *Bughyah al-Mustarsyidin*, Semarang: Usaha Keluarga, t.t.
- Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Depag RI, 2001.
- Djamil, M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Efendi, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Pernada Media, 2004.
- Fauzan, Abdul Manan M., *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang peradilan Agama*, Jakarta: Raja Wali Press, 2000.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak; Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005.
- Naim, Abdul Haris, *Fiqh Munakahat*, Kudus: Buku Daros, 2008.
- Nuruddin, Amiur & Tarigan, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Prakoso, Abintoro, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Rusyd, Ibnu, *Muqaddimah Ibn Rusyd*, Juz II, Mesir: Dar al-Fikr, t.t..
- Soeaidy, Sholeh & Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001.

- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2008.
- Syamsudin, M., *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Tihami, M. A. & Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Yusuf, Ahmad Muhammad, *Ensiklopedi Tematis Ayat Al-Qur'an & Hadits Jilid 7*, Jakarta: Widya Cahaya, 2009, hlm. 188.
- Zamzami, Mukhtar, *Perempuan dan Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Zein, Satria Efendi M., *Problematisasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004.

Perundang-Undangan:

- Kompilasi Hukum Islam.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Jurnal dan Website:

- Fanani, Ahmad Zaenal, *Sengketa Hak Asuh Anak Dalam Hukum Keluarga Perspektif Keadilan Gender*, Jurnal Muslim Heritage, Vol. 2, No.1, Mei - Oktober 2017.
- Garda Law Office, *Hak Asuh Anak Menurut Hukum Perdata dan Prosedur yang Harus Dilewati*, Online: <https://www.advokatperceraian.com>. (16 Mei 2019).
- Pengadilan Agama Brebes, Putusan Nomor: 4836/Pdt.G/ 2018/PA.Bbs.
- Solehuddin, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang)*, Jurnal Universitas Brawijaya, Malang, 2013.